



**LAPORAN
PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2017 T.A 2018**

**PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2018**

DAFTAR ISI

PETA PROVINSI KEPULAUAN RIAU
MAKNA LAMBANG DAN MOTTO PROVINSI KEPULAUAN RIAU
GAMBAR GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
GAMBAR WAKIL GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
GAMBAR SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

BAB I PENDAHULUAN A.
 Dasar Hukum 1
 B. Gambaran Umum Daerah 3

BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) 24
 A. Visi dan Misi 24
 B. Strategi dan Arah Kebijakan Daerah 26

BAB III URUSAN DESENTRALISASI 49
 A. Ringkasan Urusan Desentralisasi 49
 B. Prioritas Urusan Wajib Yang Dilaksanakan 53
 C. Prioritas Urusan Pilihan Yang Dilaksanakan 423

BAB IV TUGAS PEMBANTUAN.....459
 A. Tugas Pembantuan Yang Diterima 459

BAB V TUGAS UMUM PEMERINTAHAN 477
 A. Kerjasama Antar Daerah 477

BAB VI TUGAS UMUM PEMERINTAHAN563

BAB VII PENUTUP.....

LAMPIRAN INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)



DAFTAR TABEL

BAB I PENDAHULUAN..... 1

a. Tabel 1.1 3
Letak Geografis Kepulauan Riau Menurut Kabupaten/Kota

b. Tabel 1.2 4
Rekapitulasi Hasil Verifikasi Pulau-Pulau
Di Provinsi Kepulauan Riau

c. Tabel 1.3 4
Pulau-Pulau Terluar Provinsi Kepulauan Riau Menurut
Kabupaten/Kota

d. Tabel 1.4 6
Luas Daerah Dan Pembagian Wilayah Administrasi Provinsi Kepulauan
Riau Menurut Kabupaten/Kota

e. Tabel 1.5 8
Jumlah Penduduk Provinsi Kepulauan Riau Menurut
Kabupaten/ Kota Tahun 2014

f. Tabel 1.6 9
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Pada
Kabupaten/ Kota Di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2014

g. Tabel 1.7 11
Produksi Perikanan Budidaya Menurut Jenis Budidaya
Per Kabupaten / Kota

h. Tabel 1.8..... 12
Jumlah Armada Perikanan Menurut Kabupaten /
Kota Tahun 2014

i. Tabel 1.9..... 13
Populasi Ternak Menurut Kabupaten / Kota
Di Kepulauan Riau

j. Tabel 1.10 13
Populasi Unggas Menurut Kabupaten / Kota
Di Kepulauan Riau

k. Tabel 1.11 14
Luas Lahan Sawah, Bukan Sawah Menurut
Kabupaten / Kota

l. Tabel 1.12..... 15
Luas Tanam, Luas Panen, Produksi, Dan Produksi
Komoditas Padi Menurut Kabupaten/Kota

m. Tabel 1.13 16
Jumlah Kunjungan Wisatawan Manca Negara
Menurut Pintu Masuk Dan Negara Asal
Di Kepulauan Riau Tahun 2011 - 2013

n. Tabel 1.14 20
Perindustrian Di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2014

o. Tabel 1.15..... 21
Perdagangan di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2014

p. Tabel 1.16..... 22
Jumlah PMA Dan PMDN Di Kepulauan Riau Tahun 2014

BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH



DAERAH (RPJMD)	24
BAB III URUSAN DESENTRALISASI	49
a. Tabel 3.1.....	49
Ringkasan Urusan Wajib Provinsi Kepulauan Riau	
b. Tabel 3.2.....	50
Ringkasan Urusan Pilihan Provinsi Kepulauan Riau	
c. Tabel 3.3.....	51
Daftar Jumlah Pegawai Provinsi Kepulauan Riau	
Per - Desember 2014	
d. Tabel 3.4.....	107
Realisasi Anggaran Per Kegiatan Bersumber	
Dana APBD Dinas Kesehatan Provinsi	
Kepulauan Riau Tahun 2014	
e. Tabel 3.5.....	112
Sarana Dan Prasarana Dinas Kesehatan	
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011 - 2014	
f. Tabel. 3.6.....	148
Program Pengendalian Perencanaan Tata Ruang	
g. Tabel 3.7.....	150
Rekapitulasi Program dan Kegiatan berdasarkan	
Anggaran dan Realisasi Bidang Perencanaan	
Pembangunan - BAPPEDA	
h. Tabel 3.8.....	167
Rekapitulasi Program dan Kegiatan Badan Penanaman Modal dan	
Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
i. Tabel 3.9.....	178
Rekapitulasi Program dan Kegiatan Dinas Kependudukan dan	
Pencatatan Sipil	
j. Tabel 3.10.....	279
Program Dan Kegiatan Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan	
Umum Serta Alokasi Anggaran, Realisasi Keuangan Dan Realisasi	
Fisik	
k. Tabel 3.11	318
Program Dan Kegiatan Serta Alokasi Anggaran, Realisasi	
Keuangan Dan Realisasi Fisik Biro Administrasi Perekonomian	
l. Tabel. 3.12	402
Program, Kegiatan, Alokasi dan Realisasi Keuangan serta Fisik	
Dinas Sosial Provinsi Kepri	
m. Tabel. 3.13	413
Program, Kegiatan, Alokasi dan Realisasi Keuangan serta Fisik	
Urusan Wajib Statistik	
Tabel. 3.14	441
n. Program, Kegiatan, Alokasi dan Realisasi Keuangan serta Fisik	
Urusan Pilihan Dinas Pertambangan dan Energi	
Provinsi Kepulauan Riau	
o. Tabel. 3.15	453
Program, Kegiatan, Alokasi dan Realisasi Keuangan serta Fisik	
Urusan Pilihan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi	
Kepulauan Riau	
p. Tabel. 3.16	456
Program, Kegiatan, Alokasi dan Realisasi Keuangan serta Fisik	
Urusan Pilihan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi	
Kepulauan Riau	



**BAB IV REALISASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PEMERINTAH
(RKP) TAHUN 2017459**

BAB V TUGAS PEMBANTUAN 477

- a. Tabel 5.1504
Jumlah Pelayanan Penanganan Perempuan dan Anak korban kekerasan dan perdagangan Dari wilayah Sumatera dari Tahun 2006 - 2013
- b. Tabel 5.2544
Susunan Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2014



BAB I

PENDAHULUAN

Dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diamanatkan bahwa Kepala Daerah mempunyai kewajiban untuk menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah. Hal ini dimaksudkan untuk mewujudkan adanya stabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan mengoptimalkan pengelolaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat serta merupakan salah satu bahan evaluasi bagi Pemerintah dalam rangka pembinaan terhadap Pemerintah Daerah guna terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.

Ruang lingkup laporan meliputi penyelenggaraan urusan desentralisasi, penyelenggaraan tugas pembantuan dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat.

A. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan laporan ini adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tanggal 24 September 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau dan penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau secara resmi dimulai pada Tanggal 1 Juli 2004.
2. Keputusan Presiden Nomor 60/P Tentang Pengesahan Pemberhentian Wakil Gubernur Kepulauan Riau Masa Jabatan Tahun 2016-2021 dan Pengesahan Pengangkatan Gubernur Kepulauan Riau Sisa Masa Jabatan Tahun 2016-2021
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik



6. Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
7. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2017 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018 Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 10 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 Nomor 10);
9. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 97 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018 Nomor 476
10. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : SE.100/321/SJ Tanggal 16 Januari Tahun 2018 Perihal Pedoman Penyusunan LPPD Tahun 2017

B. Gambaran Umum Daerah

1. Kondisi Geografis Daerah; Batas Administrasi Daerah; Luas Wilayah; dan Topografi.

a. Kondisi Geografis Daerah.

Provinsi Kepulauan Riau terletak antara 0°29' Lintang Selatan (LS) - 04°40' Lintang Utara (LU) serta antara 103°22' sampai dengan 109°04' Bujur Timur. Adapun rincian letak geografis Provinsi Kepulauan Riau menurut wilayah administrasi Kabupaten/Kota dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.1
LETAK GEOGRAFIS KEPULAUAN RIAU
MENURUT KABUPATEN/KOTA

No.	Kabupaten/ Kota	Letak Geografis	
		Lintang Utara	Bujur Timur



1.	Karimun	1 ⁰ 01'58.93"LU	103 ⁰ 22'32.84"BT
2.	Bintan	1 ⁰ 05'03.94"LU	104 ⁰ 28'56.23"BT
3.	Lingga	0 ⁰ 12'36.24"LS	104 ⁰ 36'18.79"BT
4.	Natuna	3 ⁰ 56'28.62"LU	108 ⁰ 22'38.53"BT
5.	Batam	1 ⁰ 07'40.01"LU	104 ⁰ 03'18.84"BT
6.	Tanjungpinang	0 ⁰ 57'56.48"LU	104 ⁰ 26'27.62"BT
7.	Kep. Anambas	3 ⁰ 12'54.00"LU	106 ⁰ 13'04.80"BT
Kepulauan Riau		0 ⁰ 29'LS - 04 ⁰ 40'LU	103 ⁰ 22'BT-109 ⁰ 40'BT

Sumber : Biro Pemerintahan dan Perbatasan Setda Provinsi Kepulauan Riau.

Provinsi Kepulauan Riau memiliki 2.408 pulau yang seluruhnya telah diberi nama, dan telah dilakukan verifikasi terhadap seluruh pulau. Dari hasil verikasi tersebut diperoleh 1.796 pulau yang lolos dan dapat dikategorikan sebagai pulau sesuai definisi UNCLOS, kemudian telah didaftarkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia ke Badan Dunia PBB untuk di debit sebagai pulau milik Republik Indonesia. Adapun rincian pulau-pulau Provinsi Kepulauan Riau di wilayah administrasi Kabupaten/Kota dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 1.2
REKAPITULASI HASIL VERIFIKASI PULAU-PULAU
DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU

No	Kabupaten/ Kota	Jumlah Pulau
1	2	3
1.	Kota Batam	373
2.	Kota Tanjungpinang	9
3.	Kabupaten Bintan	240
4.	Kabupaten Karimun	251
5.	Kabupaten Lingga	531
6.	Kabupaten Natuna	154
7.	Kabupaten Kepulauan Anambas	238
Jumlah		1.796

Sumber : Biro Pemerintahan dan Perbatasan Setda Provinsi Kepulauan Riau.

Selain Pulau diatas Provinsi Kepulauan Riau juga memiliki 22 buah pulau terluar yang berbatasan langsung dengan beberapa negara tetangga seperti Malaysia, Singapura dan Vietnam. Sebagian besar dari pulau tersebut merupakan pulau batu karang yang tidak berpenduduk. Adapun rincian pulau-pulau terluar di Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat pada tabel 1.3 di bawah ini.

Tabel 1.3
PULAU-PULAU TERLUAR PROVINSI KEPULAUAN RIAU



MENURUT KABUPATEN/KOTA TAHUN 2017

No	Kabupaten / Kota	Pulau Terluar		
		Nama Pulau	Jmlh	Berbatasan dengan Negara
1.	Karimun	Karimun Kecil Iyu Kecil	2	Malaysia dan Singapura
2.	Bintan	Sentut Bintan Wangkang Malang Berdaun	4	Malaysia dan Singapura
3.	Batam	Nipah Pelampong Batu Berhenti Nongsa	4	Singapura
4.	Kep. Anambas	Damar Tokong Berlayar Tokong Nanas Mangkai Tokong Malang Biru	5	
5.	Natuna	Kepala Subi Kecil Senua Sekatung Sebetul Semiun Tokong Boro	7	Vietnam dan Malaysia
Jumlah			22	

Sumber : Biro Pemerintahan dan Perbatasan Setda Provinsi Kepulauan Riau.

b. Batas Administrasi Daerah.

Secara geografis wilayah Provinsi Kepulauan Riau berbatasan langsung dengan beberapa negara tetangga dan beberapa provinsi lainnya yaitu :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan negara Vietnam, Kamboja, Malaysia, dan Singapura;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Provinsi Bangka Belitung, Provinsi Riau, Provinsi Jambi dan Provinsi Sumatera Selatan;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan negara Malaysia, Singapura, dan Provinsi Riau;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan negara Malaysia, dan Provinsi Kalimantan Barat.

c. Luas Wilayah

Provinsi Kepulauan Riau yang memiliki luas 251.810,71 KM², sebagian besar wilayahnya merupakan perairan yaitu seluas 241.215,30 KM² (95,79%) sedangkan daratannya hanya seluas 10.595,41 KM² atau sebesar (4,21%) dari luas keseluruhan daratan dan lautan. Secara



administratif Provinsi Kepulauan Riau terbagi menjadi 5 Kabupaten dan 2 Kota yang selanjutnya dibagi dalam kecamatan, kelurahan dan desa. Secara rinci dapat dilihat pada tabel 1.4 berikut ini..

Tabel 1.4
LUAS DAERAH DAN PEMBAGIAN WILAYAH ADMINISTRASI
PROVINSI KEPULAUAN RIAU MENURUT
KABUPATEN/KOTA TAHUN 2017

NO	KAB/KOTA	LUAS DARAT (KM ²)	KEC.	DESA	KEL.
1	2	3	4	5	6
1.	Kab.Bintan	1.739,44	10	36	15
2.	Kab.Karimun	1.524,00	12	42	29
3.	Kab.Lingga	2.117,72	10	75	7
4.	Kab.Natuna	2.814,26	15	70	6
5.	Kab.Kep.Anambas	590,14	7	52	2
6.	Kota Batam	1.570,35	12	-	64
7.	Kota Tg.pinang	239,50	4	-	18
TOTAL		10.595,41	70	275	141

Sumber : Biro Pemerintahan dan Perbatasan Setda Provinsi Kepulauan Riau.

Jika dipandang dari luas wilayahnya, maka Kabupaten Lingga memiliki luas daratan terbesar yaitu 26,72% dari seluruh luas daratan Provinsi Kepulauan Riau diikuti Kabupaten Natuna yang memiliki 24,13% daratan, Kabupaten Bintan seluas 16,17% daratan, Kota Batam 12,24% daratan, dan Kabupaten Karimun seluas 11,1 % daratan, yang paling kecil luas wilayah daratannya adalah Kabupaten Kepulauan Anambas Tanjungpinang seluas 7,72% daratan, serta Kota Tanjungpinang seluas 1,86% daratan.

d. Topografi.

Pulau-pulau yang tersebar pada umumnya merupakan sisa-sisa erosi atau pencetusan dari daratan *pratersier* yang membentang dari Semenanjung Malaysia sampai Pulau Bangka Belitung. Pada gugusan beberapa pulau kondisi daratannya berbukit-bukit dan landai di bagian pantainya, dengan ketinggian rata-rata 2–5 meter dari permukaan laut. Selain digambarkan dengan bentangan pulau-pulau,

relief dan topografi Kepulauan Riau juga digambarkan dengan membentangnya pegunungan yang terdapat di beberapa pulau. Gunung tertinggi yaitu Gunung Daik berada di Kabupaten Lingga dengan ketinggian mencapai 1.272 meter. Selain Gunung Daik, Kabupaten Lingga juga memiliki empat gunung lain yang tingginya berkisar antara 343 meter sampai dengan 800 meter. Kabupaten Natuna merupakan kabupaten lain yang memiliki beberapa gunung dengan Gunung Ranai sebagai gunung tertinggi dengan ketinggian 959 meter. Sedangkan di Kabupaten Karimun terdapat Gunung Jantan dengan ketinggian 478 meter, dan di Kabupaten Bintan mempunyai Gunung Bintan dengan ketinggian 380 meter.

2. Gambaran Umum Demografis : Jumlah Penduduk, Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin, dan Struktur Usia.

Pembangunan sumber daya manusia (SDM) pada dasarnya merupakan pembangunan manusia sebagai subyek dan obyek pembangunan yang mencakup seluruh siklus hidup manusia. Manusia untuk selanjutnya dapat disebut sebagai penduduk yang dapat dibedakan atas jenis kelamin (laki-laki dan perempuan), kelompok umur (anak, remaja, usia produktif dan non produktif, serta usia lanjut). Dimensi pembangunan SDM dapat dilihat dari tiga aspek utama, yaitu kualitas, kuantitas, dan mobilitas penduduk. Kualitas penduduk tercermin dari tingkat kesejahteraan penduduk, yaitu tingkat kesehatan dan gizi, pendidikan, dan produktivitas. Kuantitas penduduk dikaitkan dengan jumlah dan laju pertumbuhannya. Sedangkan mobilitas penduduk merupakan refleksi dari perpindahan dan persebaran penduduk karena merespons pembangunan ekonomi.

Jumlah penduduk Provinsi Kepulauan Riau pada Tahun 2017 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Kepulauan Riau tercatat jumlah penduduk sebesar 1.827.234 jiwa. Jumlah Penduduk yang terbesar berada di Kota Batam yaitu 1.037.187 jiwa dan jumlah penduduk terkecil dimiliki oleh Kabupaten Kepulauan Anambas sebesar 42.153 jiwa sebagaimana terlihat dalam tabel 1.5.



Tabel 1.5
JUMLAH PENDUDUK PROVINSI KEPULAUAN RIAU
MENURUT KABUPATEN/ KOTA TAHUN 2017

No	Kabupaten/ Kota	Luas Wilayah Darat (KM ²)	Jumlah Penduduk (jiwa)	Kepadatan Penduduk
1	2	3	4	6
1.	Kabupaten Bintan	1.946,13	152.571	78 jiwa per KM ²
2.	Kabupaten Karimun	2.873,20	243.834	85 jiwa per KM ²
3.	Kabupaten Natuna	2.599,08	79.058	30 jiwa per KM ²
4.	Kabupaten Lingga	2.117,72	99.245	47 jiwa per KM ²
5.	Kab. Kep. Anambas	592,14	44.449	75 jiwa per KM ²
6.	Kota Tanjungpinang	239,5	213.005	891 jiwa per KM ²
7.	Kota Batam	770,27	1.063.941	1.381 jiwa per KM ²
Jumlah		10.545,90	1.896.103	180 jiwa per KM²

*Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi
Kepulauan Riau (Hasil Konsolidasi 31 Desember 2017)*

Penyebaran penduduk menurut Kabupaten/Kota terbesar di 3 (tiga) Kabupaten/ Kota besar yaitu Kota Batam sebanyak 1.063.041 jiwa (56,76%), Kabupaten Karimun sebanyak 243.834 jiwa (13%) serta Kota Tanjungpinang sebanyak 213.005 jiwa (11,17%) sehingga mengakibatkan terjadinya kesenjangan kepadatan penduduk antar Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau.

3. Kondisi Ekonomi.

a. Potensi Unggulan Daerah.

1) Sektor Kelautan

Provinsi Kepulauan Riau yang 96 persen lebih terdiri dari lautan memiliki potensi sumber daya hayati maupun non hayati yang besar, terdiri dari berbagai hasil perikanan laut, wisata bahari dan pantai, ekosistem *mangrove*, terumbu karang dan rumput laut serta beragam jenis biota dan budidaya laut lainnya. Bila aspek yang berkaitan dengan kelautan, misalnya pariwisata laut dapat lebih dikembangkan dan dikelola dengan baik bukan tidak mungkin bisa menjadi sumber pendapatan daerah yang cukup besar disamping industri pengolahan ataupun perdagangan.



Potensi perikanan tangkap di Provinsi Kepulauan Riau sebagian besar berada di wilayah pengelolaan perikanan Laut Cina Selatan dan Natuna dengan batas Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) sampai garis yang menghubungkan 04°LS # 106°BT dengan 03°LS # 111°BT.

Secara rinci Produksi Perikanan Budidaya menurut jenis Budidaya Menurut Jenis Budidaya Per Kabupaten/Kota dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.7
PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA
MENURUT JENIS BUDIDAYA (Ton)
PER KABUPATEN/ KOTA

No	Kabupaten/ Kota	Laut (ha)	Payau (ha)	Tawar (ha)
1	2	3	4	5
1.	Kab.Karimun	1.264,60	17	232,15
2.	Kab.Bintan	449,70	6,86	555,19
3.	Kab.Natuna	57.167,46	44,26	1,75
4.	Kab.Lingga	118,78	0,13	18,81
5.	Kab.Kep.Anambas	78,05	0	0
6.	Kota Batam	9.508,53	0	8.167,46
7.	Kota Tg.pinang	19,25	0	96,15
Jumlah/Total 2016		68.606,37	68,25	9.071,51

Sumber: Kepulauan Riau Dalam Angka 2017

Pada tahun 2017 jumlah armada perikanan menurut kabupaten/kota sebanyak 37.189 armada dengan rincian perahu tanpa motor sebanyak 11.612 armada, dengan motor tempel sebanyak 6.794 armada dan kapal motor sebanyak 19.783 armada. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1.8
JUMLAH ARMADA PERIKANAN
MENURUT KABUPATEN/ KOTA TAHUN 2017

N o	Kabupaten/ Kota	Perahu Tanpa Motor	Motor Tempel	Kapal Motor	Jumlah
1	2	3	4	5	6
1.	Kab.Karimun	1.971	1.548	2.811	6.330
2.	Kab.Bintan	1.407	309	3.623	5.339



3.	Kab Natuna	1.242	92	2.749	4.083
4.	Kab.Lingga	2.981	75	3.478	6.534
5.	Kab.Kep.Anambas	434	-	2.479	2.913
6.	Kota Batam	2.912	3.400	4.144	10.456
7.	Kota Tg.Pinang	665	370	499	1.534
Jumlah Total		11.612	6.794	19.783	37.189

Sumber: Kepulauan Riau Dalam Angka 2017

2) Sektor Peternakan

Walaupun wilayah Provinsi Kepulauan Riau sebagian besar luasnya merupakan laut, selain potensi sektor kelautan, terdapat juga potensi yang dimiliki oleh Provinsi Kepulauan Riau yakni sektor peternakan. Dalam konteks ini ternak dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) kelompok, yakni ternak besar (sapi, kerbau, dan kuda), ternak kecil (kambing, domba, dan babi), ternak unggas seperti ayam buras, ayam ras petelur, ayam ras potong dan itik.

Adapun rincian populasi ternak pada tahun 2017 di Provinsi Kepulauan Riau untuk sapi potong sebanyak 18.399 ekor dan kambing sebanyak 19.331 ekor serta babi sebanyak 330.015 ekor, secara rinci populasi dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.9
POPULASI TERNAK MENURUT KABUPATEN/ KOTA
DI KEPULAUAN RIAU

No	Kabupaten/Kota	Sapi Potong	Kambing	Babi
		(ekor)		
1	2	3	4	5
1.	Kab.Karimun	1.573	14.152	1.661
2.	Kab.Bintan	515	1.156	335
3.	Kab.Natuna	9.022	1.507	-
4.	Kab.Lingga	2.005	825	691
5.	Kab.Kep.Anambas	4.141	227	-
6.	Kota Batam	729	1.045	326.842
7.	Kota Tg. Pinang	414	392	486
Jumlah Total		18.399	19.331	330.015

Sumber: Kepulauan Riau Dalam Angka 2017

Terhadap Jenis Unggas Produksi Telur menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau untuk ayam buras sebanyak 324.337 Kg , ayam petelur sebanyak 2.927.288 Kg, Itik sebanyak 514.942 Kg. Secara rinci Jenis Unggas Produksi



Telur menurut Kabupaten/Kota dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1.10

JENIS UNGGAS PRODUKSI TELUR

MENURUT KABUPATEN/ KOTA

DI KEPULAUAN RIAU

No	Kabupaten/ Kota	Ayam Buras	Ayam Petelur	Itik
(Kg)				
1	2	3	4	5
1.	Kab.Karimun	137.201	112.809	1.379
2.	Kab.Bintan	609.780	277.008	7.498
3.	Kab.Natuna	989.693	1368	3.004
4.	Kab.Lingga	36.434	9.053	2.107
5.	Kab.Kep.Anambas	4.738	-	1.021
6.	Kota Batam	7.784.078	208.084	17.779
7.	Kota Tg. Pinang	59.352	61.279	2.294
JUMLAH TOTAL		9.621.276	669.565	35.082

Sumber: Kepulauan Riau Dalam Angka 2017

3) Sektor Pertanian

Mengingat besarnya luas lautan yang ada di wilayah Provinsi Kepulauan Riau, sebagian besar masyarakat memilih profesi sebagai nelayan daripada petani, selain itu juga hal ini dipengaruhi oleh tipe tanah merah di Kepulauan Riau yang bisa ditanami oleh jenis tanaman tertentu. Kondisi ini memerlukan penelitian dan pengembangan khusus untuk meningkatkan produksi pertanian dan jenis tanaman yang dibudidayakan.

Secara rinci Luas Lahan Sawah dan Bukan Sawah menurut Kabupaten/Kota dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1.11

LUAS LAHAN SAWAH DAN BUKAN SAWAH

MENURUT KABUPATEN/ KOTA

No	Kabupaten/ Kota	Lahan Sawah	Lahan Bukan Sawah	Lahan Bukan Pertanian	Jumlah
(hektar)					
1	2	3	4	5	6
1.	Kab.Karimun	194	32.404	181.222	213.820
2.	Kab.Bintan	52	105.653	89.115	194.820
3.	Kab.Natuna	735	127.822	77.288	205.845
4.	Kab.Lingga	-	94.282	117.490	211.772
5.	Kab.Kep.Anambas	642	32.769	30.850	64.261
6.	Kota Batam	-	10.809	134.234	145.043
7.	Kota Tg. Pinang	-	8.216	15.754	23.970
JUMLAH TOTAL		1.623	411.955	645.953	1.059.531

Sumber: Kepulauan Riau Dalam Angka 2017



Adapun luas tanam, luas panen, produksi komoditi padi menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau dapat kita lihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1.12
LUAS TANAM, LUAS PANEN, PRODUKSI, DAN PRODUKSI
KOMODITAS PADI MENURUT KABUPATEN/KOTA

No	Kabupaten/ Kota	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Rata-Rata Produksi (Ton/ Ha)
1	2	3	4	5	6
1.	Kab.Karimun	78	78	278	3,56
2.	Kab.Bintan	26	36	122	3,40
3.	Kab.Natuna	143	116	432	3,27
4.	Kab.Lingga	-	-	-	-
5.	Kab.Kep.Anambas	148	155	571	3,68
6.	Kota Batam	-	-	-	-
7.	Kota Tg.Pinang	-	-	-	-
JUMLAH TOTAL		395	385	1.403	3,64

Sumber: Kepulauan Riau Dalam Angka 2017

4) Sektor Pariwisata

Kepulauan Riau berada pada posisi yang cukup strategis berbatasan dengan Negara-negara tetangga ini tentu memiliki peluang untuk dikunjungi oleh wisatawan mingguan dengan didukung pula dengan berbagai kemudahan untuk berkunjung melalui kerjasama antar negara yang berdekatan tersebut. Pariwisata Kepulauan Riau bertumpu pada wisata bahari, wisata khusus seperti wisata Golf, wisata belanja, MICE (*meeting, intensive, conference dan exhitation*), wisata sejarah dan budaya, disamping itu semakin mendorong tingkat kunjungan wisata dengan berbagai kegiatan pendukung penyelenggaraan event-event wisata baik berskala nasional maupun internasional.

Jumlah kunjungan wisatawan yang masuk ke Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2017 tercatat sebanyak 2.074.673 orang atau mengalami kenaikan sebesar 3,26% dibanding kunjungan wisman selama tahun 2014 yang mencapai 1.973.425 orang.



Upaya lain yang juga terus dilakukan adalah dengan membina kerjasama antara pelaku jasa wisata Kepulauan Riau dengan pihak regional Singapura, Malaysia dan negara-negara pengirim wisatawan termasuk juga mengikuti pameran-pameran wisata di luar negeri.

Tabel 1.13
JUMLAH WISMAN YANG BERKUNJUNG
KE PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2017

No	Pintu Masuk	2017
1	Batam	1.504.275
2	Tanjungpinang	117.384
3	Bintan	368.587
4	Karimun	84.288
Jumlah		2.074.534

Sumber: Kepulauan Riau Dalam Angka 2017

5) Sektor Pertambangan

Salah satu kekayaan alam yang dimiliki Provinsi Kepulauan Riau yaitu bahan galian tambang (mineral), seperti timah, bauksit, batu besi, granit, kuarsa, pasir darat dan bahan galian industri lainnya yang cukup potensial.

Berdasarkan laporan penyelidikan pendahuluan dan informasi yang diberikan oleh Dinas Pertambangan dan Energi kabupaten/kota bahwa potensi sumber daya mineral dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Timah

Deposit bahan galian timah tersebar di wilayah perairan laut Pulau Kundur Kabupaten Karimun dan Pulau Singkep Kabupaten Lingga, ditinjau dari historis geologi merupakan jalur penyebaran endapan timah yang berasal dari ujung perairan Selat Malaka hingga Pulau Bangka. Secara ekonomis, jumlah cadangan terkira timah laut yang diusahakan oleh PT. Tambang Timah Unit Kundur sekitar 11.360.000 *metric* ton tersebar di wilayah perairan laut Kundur dan Dabo Singkep.

b. Bauksit



Potensi mineral bauksit yang terbesar dan terkenal di Indonesia terdapat di Pulau Bintan dan tersebar juga di pulau-pulau sekitarnya. Berdasarkan penelitian ahli geologi Belanda, Van Bemmelen jumlah cadangan terkira bauksit di wilayah Pulau Bintan sebesar 10.000.000 ton. Kondisi saat ini, kegiatan penambangan (eksploitasi) bauksit tersebar pula di wilayah perairan laut Kabupaten Karimun, Lingga, Kota Tanjungpinang dan Kota Batam. Informasi secara rinci mengenai jumlah cadangan ekonomis bauksit (layak tambang) yang terdapat di Provinsi Kepulauan Riau belum tersedia.

c. Batu Besi

Daerah sebaran batu besi erat kaitannya dengan penyebaran bauksit yang berasal dari rombakan batuan induk yang bersifat *granitis*, mengalami pelapukan, pengendapan (*laterisasi*) serta pengkayaan oksida besi. Kegiatan penambangan (eksploitasi) batu besi terdapat di Pulau Baruk Kabupaten Lingga dengan jumlah cadangan terkira sebesar 10 juta ton. Selain itu terdapat pula deposit batu besi di Kabupaten Anambas, Pulau Mentalak Kecamatan Siantan.

d. Granit

Penyebaran batuan granit tersebar di Kabupaten Karimun, Bintan, Natuna, Anambas, Lingga dan Kota Batam, dengan jumlah cadangan terkira yang terdapat di Pulau Karimun sebesar 815.940.000 ton dan di Pulau Bintan sebesar 42.444.000 ton.

e. Kuarsa

Deposit mineral kuarsa (rumus kimia : SiO_2) keterdapatannya sering berasosiasi dengan mineral lain berupa pasir alam, merupakan sumber daya mineral yang cukup prospek untuk dikembangkan, karena banyak dimanfaatkan sebagai bahan baku industri semen, industri gelas, kaca dan industri lainnya. Daerah sebaran mineral kuarsa tersebar di Kabupaten Bintan, Karimun, Lingga, Natuna, Anambas dan Kota Batam.

f. Pasir Darat



Pasir darat merupakan salah satu bahan galian yang banyak digunakan sebagai sumber baku material/bangunan dan kegiatan penataan lahan. Sebaran pasir darat terdapat hampir di seluruh wilayah Provinsi Kepulauan Riau, yaitu Kabupaten Karimun, Bintan, Lingga, Natuna, Anambas dan Kota Batam.

- g. Zircon Andesit, Diorit, Granulite, Rijang, Hornfels, Feldspar, Kaolin dan Batu Setengah Permata.

Penyebaran zircon erat kaitannya dengan keberadaan mineral timah (sebagai mineral pengikut) yang terbentuk pada lingkungan pengendapan alluvial, yang mengalami proses erosi dan tertransportasi jauh dari batuan induk (plutonik asam atau basa). Mineral ini dapat dijumpai pada bekas penambangan timah di darat seperti di daerah Dabo Singkep, Karimun dan Kundur. Batuan andesit, diorit dan granulite digunakan sebagai bahan pondasi bangunan. Daerah penyebarannya terdapat di Kabupaten Bintan, Karimun, Lingga, Anambas, Natuna, Kota Tanjungpinang dan Kota Batam. Rijang, hornfels, feldspar dan batusetengah permata tersebar di Kabupaten Natuna dan Anambas (data jumlah cadangan belum tersedia).

6) Sektor Industri

Pada dasarnya pengelompokan industri pengolahan dibedakan menjadi dua bagian. Pertama, adalah pembagian sektor industri pengolahan berdasarkan jenis produk yang dihasilkan ke dalam dua belas sub sektor klasifikasi industri. Kedua, adalah pembagian berdasarkan banyaknya tenaga kerja.

Pada Tahun 2016 jumlah industri di Provinsi Kepulauan Riau sebanyak 2.870 buah terbanyak di Kota Batam sebanyak 1.080 buah menyusul Kabupaten Bintan sebanyak 667 buah, Karimun sebanyak 441 buah, dan Natuna sebanyak 251 buah.

Secara keseluruhan kontribusi sektor industri terhadap PDRB cukup tinggi. Pada tahun 2012 kontribusi sektor industri sebesar Rp. 34.272.837,19 dari total PDRB sebesar Rp. 71.177.223,76 atau sebesar (48,15 %). Bila di lihat menurut Kabupaten/Kota maka sumbangan tertinggi terdapat di Kota Batam sebesar 57,85 % menyusul Kabupaten Bintan sebesar



50,72 % dan Kota Tanjungpinang sebesar 23,65 %. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1.14
PDRB PROVINSI KEPULAUAN RIAU
ATAS DASAR HARGA BERLAKU
TAHUN 2016

LAPANGAN USAHA		2014	2015	2016
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6.449,93	7.076,95	7.678,38
B	Pertambangan dan Penggalian	28.435,90	31.400,49	33.098,37
C	Industri Pengolahan	69.122,84	74.966,24	80.842,35
D	Pengadaan Listrik dan Gas	2.052,65	2.218,91	2.468,48
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	211,31	233,26	252,52
F	Konstruksi	33.227,47	36.456,42	38.848,43
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	13.197,86	15.424,15	18.066,68
H	Transportasi dan Pergudangan	5.374,60	6.260,55	7.070,85
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3.481,01	3.951,43	4.385,14
J	Informasi dan Komunikasi	3.255,46	3.603,55	3.969,12
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	4.839,37	5.280,74	5.792,54
L	Real Estat	2.639,90	2.863,61	3.171,44
M,N	Jasa Perusahaan	8,32	9,15	10,10
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4.038,04	4.627,75	5.158,22
P	Jasa Pendidikan	2.286,14	2.569,03	2.931,37
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.518,62	1.737,40	1.882,15
R,S,T, U	Jasa lainnya	740,56	858,96	980,77
PDRB DENGAN MIGAS		180,879,98	199.538,59	216.579,90
PDRB TANPA MIGAS		154.523,54	170.202,83	185.551,64

Sumber: Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha
Tahun 2012-2016



BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) PROVINSI KEPRI

A. Visi dan Misi

Visi

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 – 2021 yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2017 Visi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau adalah ***”Terwujudnya Kepulauan Riau sebagai bunda tanah melayu yang sejahtera, berakhlak mulia dan ramah lingkungan dan Unggul di Bidang Maritim.”***

Dalam Visi tersebut terdapat 5 (lima) kata kunci yaitu bunda tanah Melayu, sejahtera, berakhlak mulia dan ramah lingkungan. Adapun empat kata kunci tersebut terkandung pengertian dan pemahaman sebagai berikut :

- a. Kepulauan Riau sebagai bunda tanah Melayu menunjukkan bahwa Kepulauan Riau sebagai sebuah wilayah geografis, dulunya merupakan wilayah bekas kejayaan kerajaan Melayu Riau, yang baru berakhir pada awal abad ke 20. Dengan misi ini diharapkan pada tahun 2015, Kepulauan Riau akan menjadi Provinsi yang kembali akan *mentabalkan tamaddun/kejayaan* Melayu dalam masa kekinian dan berorientasi masa depan.
- b. Kepulauan Riau yang sejahtera adalah kondisi dimana masyarakat Kepulauan Riau dapat memenuhi seluruh kebutuhan dasarnya secara layak, meningkat pendapatannya dan standar pembangunan manusia.
- c. Kepulauan Riau yang berakhlak mulia adalah kondisi dimana Kepulauan Riau sebagai negeri berbudaya melayu memiliki sifat dan perangai, yang dapat menjadi panutan bagi masyarakat lainnya, terutama ketaatan dalam menjalankan ajaran agama, menjaga adat istiadat, memiliki semangat untuk maju dan patuh kepada hukum dan perundang-undangan.
- d. Kepulauan Riau yang ramah lingkungan adalah wilayah Kepulauan Riau yang memiliki sumber daya alam dan geografis yang terdiri dominan lautan perlu menjaga agar lingkungannya aman, nyaman dan lestari bagi tempat hidup dan mencari penghidupan masyarakat dan dapat menjamin kelangsungan pembangunan. Ramah lingkungan juga cerminan masyarakat Kepulauan Riau yang bermartabat dalam pergaulan, ramah kepada semua golongan dengan tidak membedakan suku bangsa.



e. Kepulauan Riau yang Unggul di Bidang Maritim adalah wilayah Kepulauan Riau yang memiliki wilayah perairan kepulauan dan dicitakan memiliki keunggulan pada sektor kemaritiman terutama sektor kelautan dan perikanan, perhubungan, dan pariwisata didukung dengan pembangunan sektor-sektor lainnya dengan berorientasi pada kemaritiman (maritim oriented). Pembangunan kemaritiman diharapkan mampu mewujudkan tujuan pembangunan bidang maritim, yaitu: meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya nelayan dan pembudidaya ikan; menghasilkan produk dan jasa kelautan yang berdaya saing tinggi; meningkatkan kontribusi sektor kelautan bagi perekonomian daerah; menciptakan lapangan kerja; meningkatkan konsumsi ikan; dan memelihara daya dukung lingkungan dan kelestarian sumberdaya kelautan. Keunggulan di bidang maritim juga mencakup konektivitas antar pulau dan antar kabupaten/kota, serta pemanfaatan potensi wilayah pesisir dan pulau – pulau kecil untuk pengembangan pariwisata bahari. Dalam rangka mewujudkan visi **”Terwujudnya Kepulauan Riau sebagai Bunda Tanah Melayu yang Sejahtera, Berakhlak Mulia, Ramah Lingkungan dan Unggul di Bidang Maritim”**, misi yang ditempuh sebanyak 9 (sembilan) misi, yaitu sebagai berikut:

Misi

Untuk dapat mengantisipasi kondisi yang ada serta memperhatikan tantangan kedepan, dengan mempertimbangkan peluang yang dimiliki untuk menuju Kepulauan Riau sebagai bunda tanah melayu yang sejahtera, berakhlak mulia dan ramah lingkungan, maka dirumuskan misi guna mewujudkan visi diatas, yaitu sebagai berikut :

1. Mengembangkan perikehidupan masyarakat yang agamis, demokratis, berkeadilan, tertib, rukun dan aman di bawah payung budaya Melayu;
2. Meningkatkan daya saing ekonomi melalui pengembangan infrastruktur berkualitas dan merata serta meningkatkan keterhubungan antar kabupaten/kota;
3. Meningkatkan kualitas pendidikan, ketrampilan dan profesionalisme Sumber Daya Manusia sehingga memiliki daya saing tinggi;
4. Meningkatkan derajat kesehatan, kesetaraan gender, pemberdayaan masyarakat, penanganan kemiskinan dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
5. Meneruskan pengembangan ekonomi berbasis maritim, pariwisata, pertanian untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi dan



- mengurangi kesenjangan antar wilayah serta meningkatkan ketahanan pangan;
6. Meningkatkan iklim ekonomi kondusif bagi kegiatan penanaman modal (investasi) dan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah;
 7. Meneruskan pengembangan ekonomi berbasis industri dan perdagangan dengan memanfaatkan bahan baku lokal.
 8. Meningkatkan daya dukung, kualitas dan kelestarian lingkungan hidup; dan
 9. Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, aparatur birokrasi yang profesional, disiplin dengan etos kerja tinggi serta penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas.

B. Strategi dan Arah Kebijakan Daerah

1. Strategi

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Satu strategi dapat terhubung dengan pencapaian satu sasaran. Dalam hal beberapa sasaran bersifat *inherent* dengan satu tema, satu strategi dapat dirumuskan untuk mencapai gabungan beberapa sasaran tersebut. Rumusan strategi untuk masing-masing misi dapat dijelaskan sebagai berikut :

a) Mengembangkan perikehidupan masyarakat yang agamis, demokratis, berkeadilan, tertib, rukun dan aman di bawah payung budaya Melayu

Strategi :

1. Memberdayakan tokoh-tokoh dan lembaga-lembaga adat melayu di Provinsi Kepri untuk melestarikan nilai-nilai budaya melayu dalam kehidupan masyarakat.
2. Meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai nilai-nilai agama dan kerukunan antar umat beragama bekerjasama dengan tokoh agama dan lembaga keagamaan.
3. Meningkatkan keamanan, ketenteraman dan ketertiban di lingkungan masyarakat dengan melibatkan linmas, aparat kepolisian dan TNI.

b) Meningkatkan daya saing ekonomi melalui pengembangan infrastruktur berkualitas dan merata serta meningkatkan keterhubungan antar kabupaten/kota



Strategi :

1. Meningkatkan keandalan sistem jaringan jalan melalui pengembangan jaringan infrastruktur transportasi jalan bagi peningkatkan kelancaran mobilitas barang dan manusia.
2. Meningkatkan sarana dan prasarana perhubungan darat, laut dan udara, dan pengembangan sistem manajemen transportasi.
3. Meningkatkan ketersediaan sarana drainase, sanitasi, dan persampahan melalui pembangunan dan rehabilitasi.
4. Meningkatkan ketersediaan air bersih melalui pembangunan sarana dan prasarana air bersih.
5. Menurunkan kawasan kumuh perkotaan melalui perbaikan kualitas lingkungan permukiman.
6. Melakukan pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan dan energi baru terbarukan.

c) Meningkatkan kualitas pendidikan, ketrampilan dan profesionalisme Sumber Daya Manusia sehingga memiliki daya saing tinggi

Strategi :

1. Pemberian dukungan pembiayaan bagi anak dari keluarga kurang mampu, Peningkatan ketersediaan SMA/SMK di kecamatan-kecamatan yang belum memiliki satuan pendidikan menengah, penguatan peran swasta dalam penyediaan layanan pendidikan menengah yang berkualitas, dan peningkatankualitas pendidik dan tenaga kependidikan, serta memfasilitasi pengembangan pendidikan tinggi baik level sarjana maupun diploma/ politeknik sesuai potensi kemaritiman.
2. Mengembangkan program kemitraan antara pemerintah dengan dunia usaha dan penataan lembaga pelatihan berbasis kompetensi.

d) Meningkatkan derajat kesehatan, kesetaraan gender, pemberdayaan masyarakat, penanganan kemiskinan dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Strategi :

1. Meningkatkan upaya kesehatan, promosi dan pemberdayaan masyarakat dalam perilaku hidup



bersih dan sehat, didukung pemerataan pelayanan kesehatan yang berkualitas.

2. Meningkatkan sarana dan prasarana, penerapan standar pelayanan dan perbaikan manajemen rumah sakit.
3. Memperbaiki program perlindungan sosial, meningkatkan akses terhadap pelayanan dasar, pemberdayaan kelompok masyarakat miskin serta menciptakan pembangunan yang inklusif.
4. Mengembangkan potensi ekonomi masyarakat dengan meningkatkan keterampilan, pendampingan dan fasilitasi akses modal usaha serta pengembangan BUMDesa.
5. Menerapkan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) dan Memperkuat sistem perlindungan anak dan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, termasuk tindak pidana perdagangan orang (TPPO), dengan melakukan berbagai upaya pencegahan dan penindakan.
6. Meningkatkan pembudayaan kesetiakawanan sosial dalam penyelenggaraan perlindungan sosial, serta kerjasama dalam penanggulangan bencana

e) Meneruskan pengembangan ekonomi berbasis maritim, pariwisata, pertanian untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kesenjangan antar wilayah serta meningkatkan ketahanan pangan

Strategi :

1. Percepatan pengembangan perikanan tangkap, budidaya dan pengolahan hasil perikanan melalui pengembangan sarana prasarana perikanan tangkap skala kecil, peningkatan sarana dan prasarana budidaya laut, payau, tawar serta pembenihan dan mengembangkan sarana prasarana pengolahan.
2. Meningkatkan prasarana dan sarana wisata bahari dengan memberdayakan potensi masyarakat lokal.



3. Peningkatan produktivitas pertanian, perkebunan dan peternakan melalui revitalisasi penyuluhan dan pemberdayaan kelompok tani dan kelompok ternak secara berkelanjutan
4. Meningkatkan kerjasama dengan lembaga yang bergerak dalam bidang distribusi pangan untuk memastikan ketersediaan pasokan pangan dan stabilitas harga pangan pokok.
5. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dalam pembangunan wilayah perbatasan

2. Arah Kebijakan Daerah

1. Arah Kebijakan 2016

Pembangunan daerah pada Tahun 2016 diarahkan pada: ***“Pengembangan Sektor Maritim, Energi, Air Dan Ketersediaan Pangan Serta Sumberdaya Manusia Yang Berkelanjutan Dalam Rangka Peningkatan Pembangunan Di Provinsi Kepulauan Riau”.***

Prioritas pada tahun 2016 adalah sebagai berikut:

- a. **Pengembangan Industri Pengolahan, Perikanan dan Kelautan Serta Pariwisata secara berkelanjutan guna mendukung sektor Kemaritiman**, dengan fokus pada peningkatan pertumbuhan ekonomi, peningkatan produktivitas sektor perindustrian, peningkatan produktivitas sektor kelautan dan perikanan, peningkatan kinerja sektor pariwisata, peningkatan nilai ekspor, peningkatan investasi baik PMDN maupun PMA, dan peningkatan kinerja sektor Koperasi dan UKM.
- b. **Peningkatan Produksi dan Produktivitas Pertanian, serta Kemandirian dan Ketahanan Pangan Masyarakat**, dengan fokus pada peningkatan produktivitas sektor Pertanian, dan peningkatan kinerja sektor Pangan.
- c. **Peningkatan konektivitas antar wilayah dan antar pulau serta sarana dan prasarana dasar masyarakat**, dengan fokus pada peningkatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Dasar Masyarakat Agar Dapat Hidup Secara Layak, dan peningkatan pembangunan konektivitas.
- d. **Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup & Kehutanan, Mitigasi Bencana Alam dan Perubahan Iklim**, dengan fokus pada peningkatan kualitas lingkungan hidup, mitigasi bencana dan



perubahan iklim, dan peningkatan rehabilitasi hutan dan lahan kritis.

- e. **Peningkatan Kualitas sumberdaya manusia dan kesejahteraan masyarakat yang Berkeadilan dan Berbudaya**, dengan fokus pada peningkatan kualitas sumberdaya manusia, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan budaya.
- f. **Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang baik**, dengan fokus pada: peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik.

2. Arah Kebijakan 2017

Pembangunan daerah pada Tahun 2017 diarahkan pada ***“Peningkatan pelayanan dasar dan pengembangan infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah, daya saing ekonomi dan kesejahteraan masyarakat”***.

Prioritas pada tahun 2017 adalah sebagai berikut:

- a. **Peningkatan pelayanan dasar**, dengan fokus pada peningkatan **aksesibilitas** dan mutu pendidikan menengah atas; peningkatan promotif dan preventif kesehatan; peningkatan kualitas SDM kesehatan; pencegahan dan penanganan penyakit menular dan tidak menular.
- b. **Peningkatan infrastruktur dasar dan penghubung antar wilayah**, dengan fokus pada peningkatan sarana prasarana perhubungan darat, laut dan udara, peningkatan kualitas jalan provinsi; peningkatan akses sanitasi (air limbah, persampahan, drainase); peningkatan sarana prasarana air bersih; peningkatan infrastruktur dasar pemukiman dan perumahan.
- c. **Pengembangan kemaritiman**, dengan fokus pada peningkatan produksi perikanan tangkap, produksi perikanan budidaya dan hasil olahan perikanan; dan peningkatan pembangunan pariwisata bahari.
- d. **Peningkatan ekonomi produktif**, dengan fokus pada peningkatan produktivitas pertanian tanaman pangan dan hortikultura; pengembangan Koperasi dan UMKM; pengembangan industri pengolahan (skala menengah dan besar); dan pengembangan perdagangan.
- e. **Revitalisasi budaya melayu**, dengan fokus pada pelestarian nilai-nilai adat dan seni budaya melayu, dan penciptaan icon Kepri sebagai pusat kebudayaan melayu.



- f. **Perbaikan tatakelola pemerintahan**, dengan fokus pada peningkatan kualitas dokumen perencanaan pembangunan; peningkatan kapasitas fiskal daerah; dan peningkatan Pengelolaan Keuangan dan kekayaan Daerah.

3. Arah Kebijakan 2018

Pembangunan daerah pada Tahun 2018 diarahkan pada ***“Pengembangan ekonomi kemaritiman berwawasan lingkungan untuk menanggulangi kemiskinan dan pengangguran didukung Infrastruktur yang berkualitas.***

Prioritas pada tahun 2018 adalah sebagai berikut:

- a. **Pengembangan perikanan, pariwisata bahari dan industri unggulan**, dengan fokus pada peningkatan produksi perikanan tangkap, produksi perikanan budidaya dan hasil olahan perikanan; pengembangan pariwisata bahari; pengembangan industri pengolahan (skala menengah dan besar).
- b. **Penanggulangan kemiskinan dan pengurangan pengangguran** dengan fokus pada pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan; peningkatan keberdayaan ekonomi dan kelembagaan masyarakat perdesaan; dan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial; peningkatan kualitas ketrampilan dan profesionalisme tenaga kerja; peningkatan investasi dengan promosi potensi dan kemudahan perijinan investasi.
- c. **Peningkatan kualitas pelayanan dasar** dengan fokus pada pemerataan akses dan peningkatan kualitas pelayanan pendidikan menengah atas; peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dengan upaya promotif dan preventif, peningkatan kualitas SDM, serta Pencegahan dan penanganan penyakit menular dan tidak menular.
- d. **Peningkatan kualitas infrastruktur dan lingkungan**, dengan fokus pada pembangunan sarana prasarana perhubungan darat, laut dan udara, peningkatan kualitas jalan provinsi; peningkatan akses sanitasi (air limbah, persampahan, drainase); peningkatan sarana prasarana air bersih; peningkatan infrastruktur dasar pemukiman dan perumahan; peningkatan pencegahan pencemaran/kerusakan lingkungan, dan perluasan Ruang Terbuka Hijau.



e.Pengembangan budaya melayu, dengan fokus pada pengembangan brand Kepri sebagai pusat kebudayaan melayu, dan pelestarian nilai-nilai adat dan seni budaya melayu.

f.Peningkatan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan, dengan fokus pada peningkatan kualitas laporan kinerja pemerintah daerah; peningkatan kapasitas fiskal daerah; dan peningkatan Pengelolaan Keuangan dan kekayaan Daerah.

4. Arah Kebijakan Tahun 2019

Pembangunan daerah pada Tahun 2019 diarahkan pada ***“Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan ekonomi, keberlanjutan infrastruktur serta pengembangan pusat kebudayaan melayu Kepri”***.

Prioritas pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:

a.Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, dengan fokus pada peningkatan mutu pendidikan menengah atas; penguatan promotif dan preventif kesehatan; peningkatan kualitas SDM kesehatan; Pencegahan dan penanganan penyakit menular dan tidak menular.

b.Pengembangan ekonomi kerakyatan, dengan fokus pada pengembangan Koperasi dan UMKM, pembangunan dan pengembangan industri pengolahan (skala menengah dan besar); pengembangan perdagangan; peningkatan produktivitas pertanian tanaman pangan dan hortikultura untuk memenuhi kebutuhan wilayah provinsi; peningkatan produksi perikanan tangkap, produksi perikanan budidaya dan hasil olahan perikanan; pengembangan pariwisata bahari.

c.Pengembangan pusat kebudayaan melayu, dengan fokus pada penyediaan prasarana dan sarana penunjang pusat kebudayaan melayu, dan peningkatan pelestarian adat dan seni budaya daerah.

d.Pengembangan infrastruktur wilayah, dengan fokus pada pembangunan sarana prasarana perhubungan darat, laut dan udara, peningkatan kualitas jalan provinsi; peningkatan akses sanitasi (air limbah, persampahan, drainase); peningkatan sarana prasarana air bersih; peningkatan infrastruktur dasar pemukiman dan perumahan; peningkatan pencegahan



pencemaran/kerusakan lingkungan, dan perluasan Ruang Terbuka Hijau.

e. Pengembangan tata kelola pemerintahan yang akuntabel,

dengan fokus pada Peningkatan kualitas pelayanan publik; Peningkatan kualitas laporan kinerja pemerintah daerah; Peningkatan kapasitas fiskal daerah; Peningkatan Pengelolaan Keuangan dan kekayaan Daerah.

5. Arah Kebijakan 2020

Pembangunan daerah pada Tahun 2020 diarahkan pada ***“Peningkatan kualitas Tata kelola pemerintahan yang akuntabel, iklim investasi yang kondusif, dan Pemerataan Infrastruktur guna mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan berbudaya”***.

Prioritas pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

a. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan,

dengan fokus pada peningkatan kualitas pelayanan publik; Peningkatan kualitas laporan kinerja pemerintah daerah; Peningkatan kapasitas fiskal daerah; Peningkatan Pengelolaan Keuangan dan kekayaan Daerah.

b. Peningkatan Iklim investasi yang kondusif, dengan

fokus pada peningkatan investasi dengan promosi potensi dan kemudahan perijinan investasi; peningkatan penegakan Perda Provinsi dan Peraturan Gubernur mengenai ketenteraman, ketertiban, serta antisipasi potensi gangguan keamanan.

c. Pemantapan kualitas pelayanan dasar bagi

masyarakat, dengan fokus pada peningkatan mutu pendidikan menengah atas; penguatan promotif dan preventif kesehatan; peningkatan kualitas SDM kesehatan; Pencegahan dan penanganan penyakit menular dan tidak menular.

d. Peningkatan daya saing ekonomi, dengan fokus pada

pengembangan Koperasi dan UMKM; pengembangan industri pengolahan; pengembangan perdagangan; peningkatan profesionalisme tenaga kerja; peningkatan produktivitas pertanian tanaman pangan dan hortikultura, peningkatan produksi perikanan tangkap, produksi perikanan budidaya dan hasil olahan



perikanan, pengembangan pariwisata bahari, dan pemerataan sarana prasarana perhubungan.

- e. **Pengembangan pusat kebudayaan melayu**, dengan fokus pada promosi potensi budaya melayu Kepri, dan peningkatan pelestarian adat dan seni budaya daerah.

6. Arah Kebijakan 2021

Tahun 2021 yang merupakan periode terakhir perencanaan Pembangunan daerah diarahkan pada ***“Perwujudan Kepulauan Riau sebagai Bunda Tanah Melayu yang Sejahtera, Berakhlak Mulia, Ramah Lingkungan dan Unggul di Bidang Maritim”***.

Prioritas pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- a. **Pemantapan Kepri sebagai Bunda Tanah Melayu**, dengan fokus pada optimalisasi pengembangan pusat kebudayaan melayu dan pelestarian adat dan seni budaya melayu; peningkatan pengamalan nilai-nilai keagamaan dan kerukunan antar umat beragama.

- b. **Peningkatan pendapatan dan kualitas hidup masyarakat**, dengan fokus pada peningkatan investasi dengan promosi potensi dan kemudahan perijinan investasi; pengembangan Koperasi dan UMKM; pengembangan industri pengolahan; pengembangan perdagangan; peningkatan profesionalisme tenaga kerja; peningkatan produktivitas pertanian tanaman pangan dan hortikultura; pemerataan mutu pendidikan menengah atas; penguatan promotif dan preventif kesehatan; pemerataan kualitas SDM kesehatan; optimalisasi pencegahan dan penanganan penyakit menular dan tidak menular; peningkatan keberdayaan ekonomi masyarakat perdesaan; penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial, peningkatan ketersediaan, stabilitas harga pangan, dan diversifikasi konsumsi pangan.

- c. **Pemerataan infrastruktur dan lingkungan yang berkualitas**, dengan fokus pada pemerataan pembangunan jalan provinsi; pemerataan akses sanitasi (air limbah, persampahan, drainase); dan pemerataan sarana prasarana air bersih;



pemerataan infrastruktur dasar pemukiman dan perumahan; dan Peningkatan ratio elektrifikasi rumah tangga; peningkatan pencegahan pencemaran/kerusakan lingkungan, dan perluasan Ruang Terbuka Hijau, dan Peningkatan pengendalian, pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan.

d.Peningkatan keunggulan di bidang kemaritiman, dengan fokus pada: optimalisasi produksi perikanan tangkap, produksi perikanan budidaya dan hasil olahan perikanan, optimalisasi pengembangan pariwisata bahari, dan pemerataan sarana prasarana perhubungan.

e.Pemantapan tata kelola pemerintahan, dengan fokus pada: Peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM aparatur, Peningkatan kualitas pelayanan publik, Peningkatan kualitas laporan kinerja pemerintah daerah, Peningkatan kualitas dokumen perencanaan pembangunan, Peningkatan kapasitas fiskal daerah, dan Peningkatan Pengelolaan Keuangan dan kekayaan Daerah.

C. Prioritas Daerah

Tema pembangunan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2017 yaitu ***“Peningkatan pelayanan dasar dan pengembangan infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah, daya saing ekonomi dan kesejahteraan masyarakat”***. Tema pembangunan tersebut selanjutnya dijabarkan kedalam prioritas pembangunan daerah tahun 2017 adalah

1. Peningkatan pelayanan dasar masyarakat;
2. Peningkatan infrastruktur dasar dan keterhubungan antar wilayah;
3. Pengembangan sektor maritim dan pariwisata;
4. Mengembangkan perikehidupan masyarakat yang agamis, demokratis, berkeadilan, tertib, rukun dan aman di bawah payung budaya Melayu;
5. Peningkatan ekonomi produktif;
6. Pengentasan kemiskinan; dan
7. Tatakelola pemerintahan.

Prioritas pembangunan daerah tahun 2017 tersebut kemudian dijabarkan kedalam tujuan dan sasaran beserta program dan target kinerja



tahun 2017. Perincian Prioritas, Sasaran dan Program Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2017 dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1
Prioritas, Sasaran dan Program Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017

No	Prioritas Pembangunan	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator	Satuan	Target Kinerja Tahun 2017
1	Peningkatan pelayanan dasar masyarakat	Meningkatkan Kualitas sumberdaya manusia agar berpendidikan, berprestasi dan berdaya saing	Meningkatnya Ketersediaan, Keterjangkauan, Kualitas, Kesetaraan dan Kepastian pendidikan	•Program pendidikan menengah	Rata-rata Lama Sekolah	%	9,83
					Angka partisipasi kasar SMA sederajat	%	86,00
					Angka partisipasi murni SMA sederajat	%	75,50
				•Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Guru SMA/MA/SMK/MAK/SLB yang berkualifikasi S1/D4	%	90,00
			Meningkatnya prestasi pemuda dan olahraga	•Program peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Jumlah pemuda pelopor	Orang	700
				•Program pembinaan Dan pemasyarakatan Olah Raga	Jumlah atlet berprestasi olahraga tingkat regional/nasional/internasional	Penghargaan	15
			Jumlah event olahraga tingkat daerah yang diselenggarakan masyarakat		Event	10	
		Meningkatkan calon tenaga kerja yang terampil dan berdaya saing serta terpenuhi hak dan perlindungannya .	Meningkatnya kualitas, daya saing dan penempatan tenaga kerja, serta perlindungan terhadap tenaga kerja.	•Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	%	47,75
					Persentase Lulusan BLK yang diterima kerja	%	85
				•Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	7,16
		Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang tinggi dengan pelayanan yang terjangkau dan berkualitas.	Meningkatnya status kesehatan dan gizi ibu dan anak, pengendalian penyakit menular dan tidak menular	•Program Kesehatan Masyarakat	Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 KH	per 100.000 KH	132
					Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 KH	per 1.000 KH	34
					Persentase kekurangan gizi (underweight) pada anak balita)	%	17,4



No	Prioritas Pembangunan	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator	Satuan	Target Kinerja Tahun 2017
				•Program pencegahan dan pengendalian penyakit	Prevalensi HIV	%	<0.5
					Angka Keberhasilan Pengobatan TB (success rate)	%	80
					Insidens rate DBD Per 100.000 penduduk	Per 100.000 penduduk	100
					API (Annual Paraciteper 1.000 Incidence) per 1.000 penduduk	per 1.000 penduduk	0,35
			Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan rujukan	•Program pelayanan kesehatan	Status Akreditasi RSUD Provinsi Kepri Tanjungpinang (Versi KARS)	Status	Paripurna
					Status Akreditasi RSUD Provinsi Kepri Tanjung Uban (Versi KARS)	Status	Paripurna
		Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan	Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan	•Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaa n Gender dan Anak	Persentase anggaran renponsive gender (ARG) terhadap belanja langsung APBD Provinsi	%	4,9
				•Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Rasio kekerasan terhadap Perempuan termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)	per 100.000 Perempuan	33,16
				•Program Perlindungan Anak	Persentase Kab/Kota yang melaksanakan KLA dengan pencapaian Peringkat Pratama	%	42,86
		Meningkatkan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial,	Meningkatnya penanganan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial	•Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PMKS anak yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial berbasis lembaga (panti dan LKS)	%	0,23
					Persentase lanjut usia terlanter yang mendapatkan pelayanan sosial berbasis lembaga (panti dan LKS)	%	4,91
					Persentase PMKS penyandang disabilitas yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial berbasis lembaga (panti dan LKS)	%	24,39
					Persentase	%	1,30



No	Prioritas Pembangunan	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator	Satuan	Target Kinerja Tahun 2017
					tunasosial yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial berbasis lembaga (panti dan LKS)		
					Persentase korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan perdagangan manusia yang mendapatkan rehabilitasi sosial berbasis lembaga (panti dan LKS)	%	44,69
					•Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	%	16,67
					Persentase PMKS ruang lingkup Jaminan Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan bantuan langsung berkelanjutan dan/atau asuransi kesejahteraan sosial	%	30,36
				•Program Pemberdayaan Sosial	Persentase lembaga/orsos penyelenggara pemberdayaan sosial yang mendapat pembinaan, bantuan, dan/atau fasilitasi	%	20,40
					Persentase tenaga kesejahteraan sosial masyarakat yang mendapat pembinaan, pelatihan, dan/atau fasilitasi	%	8,12
					Persentase pejuang, perintis kemerdekaan, dan keluarga pahlawan yang mendapat bantuan kesejahteraan sosial	%	100,00
				•Program Peningkatan Ketersediaan, Akses dan Distribusi Pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan	skor	89,00
		Meningkatkan Ketahanan Pangan Masyarakat secara merata di seluruh	Meningkatnya ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan yang beragam, bergizi, berimbang		Persentase maksimum koefisien harga pangan pokok	%	10



No	Prioritas Pembangunan	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator	Satuan	Target Kinerja Tahun 2017
		kabupaten/kota	dan aman serta terjangkau bagi masyarakat di seluruh wilayah		(beras) di tingkat konsumen		
				•Program Penanganan Kerawanan Pangan	Angka Rawan Pangan	%	17,45
				•Program Peningkatan Diversifikasi dan Pola Konsumsi Pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi	skor	86
2	Peningkatan infrastruktur dasar dan keterhubungan antar wilayah	Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dan keterhubungan antar wilayah dan antar pulau untuk mendukung pertumbuhan wilayah secara merata	Terhubungnya antar pulau dan antar kabupaten/kota di wilayah provinsi	•Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Darat	Persentase ketersediaan Pelabuhan Penyeberangan (roro)	%	71,43
					Persentase ketersediaan Kapal Penyeberangan (roro)	%	77,78
					Persentase pelayanan jaringan trayek angkutan penyebrangan perintis	%	53,85
				•Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Laut	Persentase ketersediaan Pelabuhan Laut	%	64,71
				•Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Udara	Persentase ketersediaan jaringan trayek angkutan udara perintis	%	75,00
				•Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Persentase jalan provinsi berkondisi baik	%	67,97
					Persentase jembatan kondisi baik	%	79,88
		Meningkatkan ketersediaan sarana prasarana pengairan untuk mendukung produktivitas pertanian	Meningkatnya fungsi sarana prasarana pengairan (irigasi)	•Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Persentase Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada	%	39,64
		Meningkatkan penyediaan prasarana dan sarana dasar masyarakat agar dapat hidup secara layak	Meningkatnya kapasitas dan fungsi sanitasi dan air bersih/minum	•Program Peningkatan Pemenuhan Akses Sanitasi	Cakupan pelayanan Sanitasi:		
					Air Limbah	%	85,45
					Persampahan	%	56,00
					Drainase	%	32,24
				•Program pengembangan	Persentasi pelayanan akses air	%	89,44



No	Prioritas Pembangunan	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator	Satuan	Target Kinerja Tahun 2017
				kinerja pengelolaan air bersih/air minum	bersih/minum yang aman (%)		
			Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman dan perumahan di kawasan perkotaan dan perdesaan	•Program Peningkatan Dukungan Layanan Dasar Permukiman dan Perumahan	Luas kawasan kumuh	ha	752,99
			Meningkatnya rasio elektrifikasi	•Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	Rasio elektrifikasi	%	89,15
		Meningkatkan kualitas lingkungan hidup, pengelolaan dan pelestarian hutan, dan penanganan lahan kritis secara berkelanjutan	Berkurangnya kerusakan lingkungan, terkelolanya hutan dan laut secara lestari, dan berkurangnya lahan kritis secara berkelanjutan.	•Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Angka	67,70
				•Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Jumlah Sekolah yang memperoleh penghargaan Adiwiyata Provinsi dan atau tingkat Nasional	Sekolah	23
					Luas kawasan mangrove yang terehabilitasi	ha	2
				•Program Pengembangan, dan Pemanfaatan Kawasan Hutan	Luas lahan kritis terehabilitasi	ha	243
3	Pengembangan sektor maritim dan pariwisata	Meningkatkan produksi perikanan, budidaya, perikanan tangkap, dan hasil olahan perikanan	Meningkatnya produksi perikanan dan hasil olahan perikanan	•Program pengembangan perikanan tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	304.019,32
				•Program pengembangan budidaya perikanan	Jumlah produksi perikanan budidaya	Ton	33.649,95
				•Program Penguatan Daya Saing Hasil Perikanan	Jumlah produk olahan Hasil perikanan (Ton)	Ton	1.320,94
		Menjaga Kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan	Lestarinnya sumber daya kelautan dan perikanan	•Program Pengelolaan Sumber Daya Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Produk peraturan perundang-undangan tentang pengaturan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan	kumen/ Peraturan	1 (dok. pendukung RZWP3K)
			Menurunnya kasus IUU Fishing	•Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	% Jumlah kasus Iuu Fishing / konflik pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang diselesaikan	%	100



No	Prioritas Pembangunan	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator	Satuan	Target Kinerja Tahun 2017
		Meningkatkan kunjungan wisata baik nusantara maupun mancanegara	Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara	•Program Pengembangan Pemasaran pariwisata	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Kepulauan Riau	Juta orang	2.2
					Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara di Kepulauan Riau	Juta orang	1,51
4	Mengembangkan perikehidupan masyarakat yang agamis, demokratis, berkeadilan, tertib, rukun dan aman di bawah payung budaya Melayu.	Melestarikan Nilai-Nilai dan Seni Budaya Melayu guna Mewujudkan Masyarakat Kepulauan Riau yang berkepribadian dan Berakhlak Mulia.	Meningkatnya kelestarian nilai-nilai dan seni budaya melayu sebagai kekayaan budaya daerah	•Program Pengembangan Nilai Budaya	Persentase bangunan yang berciri khas melayu	%	6,02
					Presentase Nilai Adat dan tradisi yang digali diaktualisasi dan revitalisasi	%	8,87
				•Program pengelolaan kekayaan budaya.	Persentase warisan budaya tangible yang lestari	%	19,58
				•Program pengelolaan keragaman budaya	Persentase Organisasi Budaya Berkategori Maju	%	14,49
					Persentase Sanggar seni yang aktif mengajarkan kesenian dan tradisi lokal	%	6,49
			Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai agama	•Program Pembinaan, Fasilitasi, Peningkatan, Pemahaman, Penghayatan, Pengamalan dan Pengembangan Nilai-Nilai Keagamaan	Persentase pelaksanaan hari-hari besar keagamaan	%	100
5	Peningkatan ekonomi produktif	Meningkatkan minat dan realisasi investasi di provinsi Kepulauan Riau	Meningkatnya realisasi investasi domestik dan investasi asing, pelayanan perijinan, serta kebijakan yang menjamin kepastian hukum bagi pelaku usaha	•Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Jumlah Investor Dalam Negeri	Investor	135
					Jumlah Investor Luar Negeri	Investor	100
				•Program peningkatan Iklim Investasi Dan Realisasi Investasi	Jumlah Nilai realisasi investasi (PMA)	Rupiah Milyar	7.300
					Jumlah Nilai realisasi investasi (PMDN)	Rupiah Milyar	500
		Meningkatkan kemandirian dan daya saing koperasi dan UKM sebagai usaha ekonomi rakyat	Meningkatnya kualitas dan kuantitas koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah	•Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase koperasi aktif	%	51,2
					Persentase KSP/USP sehat	%	15,3
				•Program Peningkatan Daya Saing UKM dan koperasi	Persentase Koperasi dan UKM yang memiliki Produk diterima dipasar	%	18,5



No	Prioritas Pembangunan	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator	Satuan	Target Kinerja Tahun 2017
		Meningkatkan ekspor dan produktivitas industri berbahan baku lokal	Meningkatnya kuantitas dan omset produksi industri pengolahan berbasis bahan baku lokal	•Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial	modern atau tersertifikasi		
				•Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Jumlah Sentra Industri dilengkapi Infrastruktur penunjang	Sentra	6
					Jumlah industri menengah dan besar	unit	2.000
			Meningkatnya kinerja sektor perdagangan dan sarana prasarana perdagangan, serta pengamanan perdagangan	•Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor.	Jumlah industri berbahan baku lokal	unit	1.720
					Nilai ekspor produk-produk berbahan baku lokal asal Kepri	juta US \$	1.258,94
					Nilai ekspor Non Migas Provinsi Kepulauan Riau	Ribu US \$	8.557.950,00
					Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	%	8,19
		Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Pertanian, perkebunan dan peternakan guna memenuhi kebutuhan masyarakat.	Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan dan peternakan	•Program peningkatan kesejahteraan Petani	Nilai tukar petani	%	97,50
				•Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Jumlah Produksi Padi	ton	792
					Jumlah Produksi Tanaman Palawija	ton	12.367
					Jumlah Produksi Tanaman Komoditas Hortikultura	ton	39.936
					Jumlah produksi Tanaman Perkebunan	ton	31.338
				•Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Persentase Produk Pangan Asal Hewan yang Aman dan Sehat	%	54,90
				•Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Persentase Peningkatan Populasi Ternak	%	6,00
6	Pengentasan kemiskinan	Menurunkan angka kemiskinan baik di wilayah perdesaan maupun perkotaan	Menurunnya persentase penduduk miskin	•Program penanggulangan kemiskinan	Persentase keluarga miskin yang menerima bantuan melalui mekanisme Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	%	0,61
					Persentase keluarga miskin yang menerima bantuan kesejahteraan sosial lainnya	%	51,53
			Meningkatnya keberdayaan	•Program pengembangan	Jumlah Badan Usaha Milik Desa	Unit BUMDesa	35



No	Prioritas Pembangunan	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator	Satuan	Target Kinerja Tahun 2017
			ekonomi masyarakat dan kelembagaan masyarakat pedesaan	lembaga ekonomi pedesaan	(BUMDesa) yang aktif		
				•Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang telah aktif	%	40,22
		Meningkatkan keterpaduan pembangunan wilayah perbatasan	Meningkatnya pembangunan wilayah perbatasan	•Program pengembangan wilayah perbatasan	Persentase Fasilitas Penyelesaian Batas Darat Kab/Kota	%	85
7	Tatakelola pemerintahan	Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas SDM aparatur	Meningkatnya kemampuan, profesionalitas dan etos kerja aparatur pemerintah	•Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	Persentase peningkatan Kompetensi ASN melalui pengembangan kompetensi	%	14,07
				•Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Penurunan Kasus Indisipliner Pegawai Tingkat Sedang dan Berat	Kasus	16
					Persentase ASN yang Memiliki Penilaian Kinerja Baik	%	90
					Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi dan Administrasi yang Menduduki Jabatan sesuai dengan Syarat dan Kompetensi Jabatan	%	78
		Meningkatkan Kualitas Pelayanan pada unit-unit pelayanan publik berbasis teknologi informasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik, pengelolaan informasi publik, dan penerapan e-government	•Program pengembangan e-government	Nilai e- government Provinsi Kepri	Skala nilai 1-4	2,1
				•Program peningkatan kualitas pelayanan dan informasi publik	Persentase SOP pada slrh OPD yang telah diimplementasikan	%	78
			Meningkatnya pelayanan perpustakaan Provinsi Kepulauan Riau	•Program pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Persentase Peningkatan Pengunjung Perpustakaan	%	21,84
			Meningkatnya tata kelola jaminan keamanan informasi menggunakan persandian (aspek kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian dan/atau nir-sangkal)	•Program Persandian untuk Pengamanan Informasi	Persentase Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Persandian untuk Pengamanan Informasi per program)	%	10
		Meningkatkan	Meningkatnya	•Program	Peringkat Laporan	Peringkat	Tinggi



No	Prioritas Pembangunan	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator	Satuan	Target Kinerja Tahun 2017
		kinerja pemerintahan dan kualitas perencanaan pembangunan daerah	prestasi kinerja pemerintah provinsi Kepulauan Riau	Peyelenggaraan Pemerintahan Umum Daerah	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi (LPPD)		
				•Program Peyelenggaraan Pemerintahan Umum Daerah	Peringkat Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi (LPPD)	Peringkat	Tinggi
		Meningkatkan kapasitas fiskal daerah dalam membiayai pembangunan, dan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah provinsi dan kabupaten/kota	Meningkatnya pendapatan daerah, dan terwujudnya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), APBD, dan LPP APBD Provinsi dan kabupaten/kota yang tepat waktu dan akuntabel	•Program intensifikasiifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah	Realisasi Pendapatan Asli Daerah	Trilyun Rupiah	1,213
				•Program Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK atas LKPD Provinsi Kepulauan Riau	Status	WTP
				•Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Daerah	Level Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Level	3
		Meningkatkan keamanan, ketenteraman, ketertiban, kerukunan, dan nasionalisme di masyarakat	Terciptanya lingkungan yang aman, tenteram, tertib dan kondusif serta meningkatnya jiwa nasionalisme masyarakat.	•Program Penerapan dan Penegakan Hukum serta HAM	Jumlah Pelanggaran Peraturan Daerah Dan Peraturan Gubernur	kasus	250
				•Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Persentase demo yang berjalan aman	%	92
				•Program pengembangan wawasan kebangsaan	Persentase konflik sosial tertangani	%	100,00



BAB III
URUSAN DESENTRALISASI

A.Ringkasan Urusan Desentralisasi

1. Anggaran, Realisasi, dan Pelaksana Urusan Wajib

Tabel 3.1

RINGKASAN URUSAN WAJIB PROVINSI KEPULAUAN RIAU

No.	Urusan Wajib	Belanja Tidak Langsung	Belanja Langsung			Total Belanja	Realisasi Belanja	Persen tasi (%)	Nama-Nama SKPD Pelaksana
			Belanja Pegawai	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Modal				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22	Sosial	4.213.239.818,80	3.423.437.000,00	12.786.266.341,63	989.500.000,00	21.412.443.160,43	20.976.938.058,00	97,97	Dinas Sosial
			BL = 17.199.203.341,63						

2. Anggaran, Realisasi, dan Pelaksana Urusan Pilihan

Tabel 3.2

RINGKASAN URUSAN PILIHAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

No .	Urusan Pilihan	Belanja Tidak Langsung	Belanja Langsung			Total Belanja	Realisasi Belanja	Persen tasi (%)	Nama-Nama SKPD Pelaksana
			Belanja Pegawai	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Modal				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

3. Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Per-Desember 2017

NO	INSTANSI	ESSELON							JUMLAH	STAF	JMLH
		I.b	II.a	II.b	III.a	III.b	IV.a	IV.b	ESELON		
33	Dinas Sosial		1		5		15		21	22	43

a. Ringkasan Urusan Wajib

18.Sosial

1. Program, Kegiatan, Alokasi dan Realisasi Keuangan serta Fisik.

Alokasi dana untuk urusan wajib urusan Sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau. Pada tahun anggaran 2017, urusan sosial terdiri 9 program dan 41 kegiatan dengan total Anggaran Belanja Langsung Rp17.199.203.341,63 realisasi keuangan Belanja Langsung sebesar Rp16.805.668.231,00 (97,97%) dan realisasi fisik sebesar 100% dengan rincian alokasi anggaran dan realisasi per kegiatan sebagai berikut :

a.Program Pelayanan Administrasi Perkantoran



Program pelayanan administrasi perkantoran memiliki total anggaran Rp2.830.322.100,00 dan realisasi sejumlah Rp2.792.856.129,00 dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan:

Anggaran Rp921.000.000,00 realisasi Rp921.000.000,00 atau 100% dan realisasi fisik 100%.

2. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung:

Anggaran Rp463.310.000,00 realisasi Rp429.574.950,00 atau 92,72% dan realisasi fisik 100%.

3. Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Rutinitas Perkantoran:

Anggaran Rp1.446.012.100,00 realisasi Rp1.442.281.179,00 atau 99,74% dan realisasi fisik 100%.

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur memiliki total anggaran Rp 1.325.987.500,00 dan realisasi sejumlah Rp 1.315.302.600,00 dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

4. Kegiatan Penyediaan Fasilitas Kantor Dinas Sosial Provinsi

Kepri:

Anggaran Rp 860.638.500,00 realisasi Rp 859.079.400,00 atau 99,82% dan realisasi fisik 100%.

5. Kegiatan Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana-Prasarana Aparatur:

Anggaran Rp465.349.000,00 realisasi Rp 456.223.200,0 atau 98,04% dan realisasi fisik 100%.

c. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja dan Keuangan memiliki total anggaran Rp 120.650.317,13 dan realisasi sejumlah Rp 120.629.488,00 dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

6. Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD:

Anggaran Rp 100.150.317,13 realisasi Rp100.141.288,00 atau 99,99% dan realisasi fisik 100%.

7. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP):

Anggaran Rp 20.500.000,00 realisasi Rp20.488.200,00 atau 99,94% dan realisasi fisik 100%.

d. Program Penanggulangan Kemiskinan



Program Penanggulangan Kemiskinan memiliki total anggaran Rp2.854.916.000,00 dan realisasi sejumlah Rp 2.729.679.728,00 dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

8. Penanganan Fakir Miskin Perkotaan Melalui UEP

Anggaran Rp371.815.000,00 realisasi Rp355.470.808,00 atau 95,60% dan realisasi fisik 100%.

9. Penanganan Fakir Miskin Perdesaan Melalui UEP

Anggaran Rp203.070.000,00 realisasi Rp193.819.820,00 atau 95,44% dan realisasi fisik 100%.

10. Penanganan Fakir Miskin Wilayah Pesisir dan Perbatasan Melalui UEP:

Anggaran Rp99.000.000,00 realisasi Rp94.786.000,00 atau 95,74% dan realisasi fisik 100%.

11. Penanganan Fakir Miskin Wilayah Pesisir dan Perbatasan Melalui Bankesos:

Anggaran Rp133.218.000,00 realisasi Rp131.153.400,00 atau 98,45% dan realisasi fisik 100%.

12. Penanganan Fakir Miskin Melalui Bankesos:

Anggaran Rp2.047.813.000,00 realisasi Rp1.954.449.700,00 atau 95,44% dan realisasi fisik 100%.

e. Program Rehabilitasi Sosial

Program Rehabilitasi Sosial memiliki total anggaran Rp2.493.552.763,00 dan realisasi sejumlah Rp2.432.314.105,00 dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

13. Rehabilitasi Sosial Anak:

Anggaran Rp340.361.000,00 realisasi Rp319.534.511,00 atau 93,88% dan realisasi fisik 100%.

14. Pelayanan Sosial Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus:

Anggaran Rp198.495.000,00 realisasi Rp198.358.500,00 atau 99,93% dan realisasi fisik 100%.

15. Pelayanan Sosial Lanjut Usia:

Anggaran Rp342.359.000,00 realisasi Rp342.041.184,00 atau 99,91% dan realisasi fisik 100%.

16. Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas:

Anggaran Rp478.525.000,00 realisasi Rp455.397.900,00 atau 95,17% dan realisasi fisik 100%.

17. Pelayanan Sosial Melalui UPSK:

Anggaran Rp417.300.000,00 realisasi Rp410.658.600,00 atau 98,41% dan realisasi fisik 100%.

18. Peningkatan Wawasan Penyandang Disabilitas Anak:



Anggaran Rp150.000.000,00 realisasi Rp144.565.000,00 atau 96,38% dan realisasi fisik 100%.

19. Rehabilitasi Sosial Tunasosial dan Korban Perdagangan Orang:
Anggaran Rp274.532.763,00 realisasi Rp274.072.910,00 atau 99,83% dan realisasi fisik 100%.

20. Rehabilitasi Sosial Berbasis Masyarakat:
Anggaran Rp291.980.000,00 realisasi Rp287.685.500,00 atau 98,53% dan realisasi fisik 100%.

f. Program Perlindungan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial

Program Perlindungan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial memiliki total anggaran Rp1.710.124.600,00 dan realisasi sejumlah Rp1.657.328.740,00 dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

21. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam:
Anggaran Rp272.740.000,00 realisasi Rp265.849.286,00 atau 97,47% dan realisasi fisik 100%.

22. Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial:
Anggaran Rp146.050.000,00 realisasi Rp145.790.600,00 atau 99,82% dan realisasi fisik 100%.

23. Penyelenggaraan Jaminan Kesejahteraan Sosial (Jamkesos):
Anggaran Rp907.983.000,00 realisasi Rp865.747.670,00 atau 95,35% dan realisasi fisik 100%

24. Peningkatan Kesiapsiagaan Taruna Siaga Bencana (TAGANA);
Anggaran Rp383.351.600,00 realisasi Rp379.941.184,00 atau 99,11% dan realisasi fisik 100%

g. Program Pemberdayaan Sosial

Program Pemberdayaan Sosial memiliki total anggaran Rp1.766.716.838,00 dan realisasi sejumlah Rp1.750.136.175,00 dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

25. Pemberdayaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat (TKSM):
Anggaran Rp134.551.000,00 realisasi Rp126.556.137,00 atau 94,06% dan realisasi fisik 100%.

26. Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial:
Anggaran Rp290.307.200,00 realisasi Rp289.656.300,00 atau 99,78% dan realisasi fisik 100%.

27. Penguatan Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial:
Anggaran Rp295.966.488,00 realisasi Rp294.976.188,00 atau 99,67% dan realisasi fisik 100%.



28. Pengusulan Gelar Pahlawan Nasional:

Anggaran Rp170.000.000,00 realisasi Rp169.741.800,00 atau 99,85% dan realisasi fisik 100%.

29. Pemberdayaan Sosial Karang Taruna:

Anggaran Rp83.892.150,00 realisasi Rp 83.845.250,00 atau 99,94% dan realisasi fisik 100%.

30. Pembinaan Panti Asuhan:

Anggaran Rp 792.000.000,00 realisasi Rp785.360.500,00 atau 99,16% dan realisasi fisik 100%.

h. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya memiliki total anggaran Rp 2.327.756.623,50 dan realisasi sejumlah Rp 2.292.239.170,00 dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

31. Penyuluhan Sosial:

Anggaran Rp838.123.000,00 realisasi Rp829.701.975,00 atau 99,00% dan realisasi fisik 100%

32. Monev Program Kesejahteraan Sosial:

Anggaran Rp213.781.023,50 realisasi Rp211.552.000,00 atau 98,96% dan realisasi fisik 100%

33. Rapat Koordinasi Program Kesejahteraan Sosial:

Anggaran Rp213.781.023,50 realisasi Rp211.552.000,00 atau 98,96% dan realisasi fisik 100%

34. Penyusunan Penerapan SPM Bidang Sosial:

Anggaran Rp51.000.000,00 realisasi Rp50.616.950,00 atau 99,25% dan realisasi fisik 100%

35. Penyusunan SOP Bidang Kesejahteraan Sosial:

Anggaran Rp102.480.000,00 realisasi Rp100.589.380,00 atau 98,16% dan realisasi fisik 100%

36. Pengendalian Pendistribusian Beras Sejahtera:

Anggaran Rp305.463.000,00realisasi Rp287.971.853,00 atau 94,27% dan realisasi fisik 100%

37. Fasilitas Pembentukan Unit Pelayanan Teknis Dinas Sosial:

Anggaran Rp365.787.000,00 realisasi Rp364.794.951,00 atau 99,73% dan realisasi fisik 100%

38. Penyusunan Kebijakan Penyandang Disabilitas:

Anggaran Rp199.720.000,00 realisasi Rp199.229.761,00 atau 99,75% dan realisasi fisik 100%



39. Kegiatan survey, verifikasi, dan monitoring pada kegiatan hibah/sosial SKPD:

Anggaran Rp48.830.600,00 realisasi Rp 48.749.500,00 atau 99,83% dan realisasi fisik 100%

i. Program Pengembangan Data/Informasi

Program Pengembangan Data/Informasi memiliki total anggaran Rp1.769.176.600,00 dan realisasi sejumlah Rp1.715.182.096,00 dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

40. Publikasi Program Kesejahteraan Sosial:

Anggaran Rp723.421.600,00 realisasi Rp718.547.936,00 atau 99,33% dan realisasi fisik 100%

41. Updating Data PMKS:

Anggaran Rp1.045.755.000,00 realisasi Rp996.634.160,00 atau 95,30% dan realisasi fisik 100%

2. Proses Perencanaan pembangunan

Seluruh Program dan Kegiatan merupakan hasil usulan yang berasal dari Renja SKPD dan telah dilakukan pembahasan dalam Forum MUSRENBANG Tingkat Provinsi Kepulauan Riau.

3. Kondisi Sarana dan Prasarana

Kondisi sarana prasarana yang ada di Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau sangat memadai atau mencukupi untuk menunjang kelancaran program dan kegiatan saat ini.

4. Permasalahan dan solusi

- 1) Belum optimalnya koordinasi dengan SKPD terkait di Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau untuk melaksanakan program dan kegiatan bersama. Sehingga Kabupaten/Kota belum dapat memprogramkan dan merencanakan kegiatan terkait dengan program dan kegiatan Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau. Solusi, agar SKPD terkait di Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau untuk dapat melaksanakan program dan kegiatan pada awal tahun sehingga realisasi kegiatan pada akhir tahun dapat optimal.
- 2) Belum optimalnya koordinasi dan sosialisasi di masyarakat se Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau mengenai penderita psikotis (orang gila) yang dirujuk ke pusat-pusat rehabilitasi (Rumah Sakit Jiwa). Solusi, agar SKPD terkait di Kabupaten/Kota dapat melakukan koordinasi dan sosialisasi ke masyarakat jika ada salah satu keluarga atau penderita psikotis yang berada di lingkungannya mau untuk dirujuk ke pusat-pusat rehabilitasi (Rumah Sakit Jiwa). Penderita



Psikotis wajib mendapatkan pengobatan dan perawatan di Rumah Sakit Jiwa agar nantinya “eks psikotis” dapat diterima kembali oleh masyarakat.

- 3) Penanganan anak jalanan masih dilakukan secara parsial, sektoral, temporel belum terencana dan terintegrasi, sehingga efektifitas penanganan belum maksimal. Permasalahan yang menonjol saat ini yaitu maraknya keberadaan anak jalanan sebagai Loper Koran, Pengamen, Pengemis, Pemulung dan Anak Punk. Mereka tersebar di Tanjungpinang, Batam dan Tanjung Balai bersifat aktif di jalanan dan musiman. Sekali-kali muncul dari luar Kepri (Pekanbaru, Dumai, Medan). Rumah Singgah, Yayasan dan Organisasi sosial lainnya sebagai lembaga pendampingan bagi anak jalanan kondisinya diliputi keterbatasan anggaran, sarana prasarana dan sumber daya manusia yang profesional dalam memberikan pendampingan terhadap anak jalanan. Solusi, MoU antara Gubernur Kepri dengan Walikota Tanjungpinang, Batam dan Bupati Karimun tentang Penertiban dan Pembinaan Anak Jalanan. Kampanye, Edukasi dan Informasi. Mengembangkan Program Dukungan Keluarga, Mengembangkan Program Penguatan Bagi Anak Yang Rentan Menjadi Anak Jalanan, Penguatan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Dan Lembaga-lembaga Berbasis Masyarakat.



3. Lingkungan Hidup dan Kehutanan

A. Program, Kegiatan, Alokasi dan Realisasi Keuangan serta Fisik

Urusan Wajib Lingkungan Hidup dan Kehutanan dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau. Alokasi dana untuk urusan (lingkungan hidup dan Kehutanan) pada tahun anggaran 2017 sebesar Rp. 20.857.741.825,- sedangkan realisasi keuangan sebesar Rp. 19.032.073.458,- (91,29%) dan realisasi fisik sebesar (96,56%) dengan rincian alokasi anggaran dan realisasi per kegiatan sebagai berikut :

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

a) Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

- Anggaran Rp.1.080.821.250,-
realisasi keuangan Rp.946.074.200,- (87,53%) dan
realisasi fisik (100%)

b) Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung

- Anggaran Rp.321.750.000,-
realisasi keuangan Rp.321.142.800,- (99,81%) dan
realisasi fisik (100%)

c) Pelaksanaan Kegiatan Rutinitas Perkantoran

- Anggaran Rp.1.584.292.250,-
realisasi keuangan Rp.1.553.312.107,- (98,04%) dan
realisasi fisik (100%)

d) Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran

- Anggaran Rp.299.875.000,-
realisasi keuangan Rp.276.368.500,- (92,16%) dan
realisasi fisik (100%)

2) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

a) Pendidikan dan Pelatihan Non Formal, Bimtek dan Kursus

- Anggaran Rp.255.305.000,- realisasi keuangan
Rp. 255.264.450,- (99,98%) dan realisasi fisik (100%)

b) Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Lingkungan Hidup di Prov. Kepri (Kegiatan di Hilangkan di APBDP

- Anggaran Rp. 0,- realisasi keuangan
Rp. 0,- (0%) dan realisasi fisik (0%)

c) Bimbingan Teknis Pelaporan Izin Lingkungan

- Anggaran Rp.78.817.125,- realisasi keuangan



Rp. 74.436.400,- (94,44%) dan realisasi fisik (100%)

**3)Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan.**

a)Kegiatan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (LAKIP)

➤ Anggaran Rp.22.125.000,-realisasi
keuangan Rp. 22.125.000,- (100%) dan
realisasi fisik (100%)

b)Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja SKPD

➤ Anggaran Rp.61.087.500,-
realisasi keuangan Rp.60.419.000,- (98,91%) dan
realisasi fisik (100%)

**4)Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan
Lingkungan Hidup**

a)Pemantauan Penilaian Kota Bersih dan Hijau (ADIPURA)

➤ Anggaran Rp.183.712.500,-
realisasi keuangan Rp.183.083.300,- (99,66%) dan
realisasi fisik (100%)

b)Pembinaan dan Pengawasan Kinerja Komisi AMDAL
Daerah

➤ Anggaran Rp.63.750.000,-
realisasi keuangan Rp.62.979.047,- (98,79%) dan
realisasi fisik (100%)

c) Penanganan Pengaduan dan Penyelesaian
Sengketa Lingkungan Hidup (Pos P3SLH)

➤ Anggaran Rp.197.060.750,-
realisasi keuangan Rp.196.998.025,- (99,97%) dan
realisasi fisik (100%)

d)Pemantauan Kualitas Air Laut Prov. Kepri

➤ Anggaran Rp.77.390.000.-
realisasi keuangan Rp.73.099.050.- (94,46%) dan
realisasi fisik (100%)

e) Pengawasan Penataan Peraturan Lingkungan
Hidup Bagi Pelaku Usaha/Industri

➤ Anggaran Rp.189.142.275,-
realisasi keuangan Rp.188.966.000,- (99,91%) dan
realisasi fisik (100%).



- f) Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Limbah B3
- Anggaran Rp.108.136.250.-
realisasi keuangan Rp.107.831.203.- (99,72%) dan
realisasi fisik (100%)
- g) Pemantauan Implementasi Dokumen RKL-RPL, UKL-UPL Kabupaten/Kota
- Anggaran Rp.91.830.000,-
realisasi keuangan Rp.91.660.950,- (99,82%) dan
realisasi fisik (100%)
- h) Pemantauan Kualitas Air Bersih di Provinsi Kepulauan Riau
- Anggaran Rp.72.129.000,-
realisasi keuangan Rp.72.079.900.- (99,93%) dan
realisasi fisik (100%)
- i) Pengelolaan Persampahan Limbah Domestik di Provinsi Kepulauan Riau
- Anggaran Rp.87.700.000.-
realisasi keuangan Rp.84.670.000.- (96,55%) dan
realisasi fisik (100%)
- j) Pemantauan Kualitas Udara Ambien di Prov. Kepri
- Anggaran Rp.72.703.675,-
realisasi keuangan Rp.72.480.625,- (99,69%) dan
realisasi fisik (100%)
- k) Study Kelayakan TPA Regional di Pulau Bintan
- Anggaran Rp.411.008.070,-
realisasi keuangan Rp.390.551.850,- (95,02%) dan
realisasi fisik (100%)
- l) Pengadaan Tong Sampah di Kabupaten Bintan (Bintan Utara)
- Anggaran Rp.95.075.000,-
realisasi keuangan Rp.93.742.500,- (98,60%) dan
realisasi fisik (100%)
- m) Pengelolaan Bank Sampah Kota Batam
- Anggaran Rp.270.408.750.-
realisasi keuangan Rp.253.508.600.- (93,75%) dan
realisasi fisik (100%)
- n) Pengelolaan Rutinitas Laboratorium Lingkungan Hidup



- Anggaran Rp.418.212.500.-
realisasi keuangan Rp.377.651.993.- (90,30%) dan
realisasi fisik (100%)

**5) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
dan Lingkungan Hidup**

- a) Pembinaan dan Pemulihan kerusakan Hutan Mangrove
Berbasis Masyarakat
➤ Anggaran Rp.217.499.250,- realisasi keuangan
Rp.215.255.550,- (98,97%) dan realisasi fisik (100%)
- b) Pembinaan dan Penilaian Sekolah Adiwiyata di Prov. Kepri
➤ Anggaran Rp.481.615.000,- realisasi keuangan
Rp.461.989.450,- (95,93%) dan realisasi fisik (100%)
- c) Koordinasi Percepatan Pelaksanaan Reklamasi Lahan Ex
Tambang di Prov. Kepri
➤ Anggaran Rp.36.367.500,- realisasi keuangan Rp.
36.275.000,- (99,75%) dan realisasi fisik (100%)

**6) Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber
Daya Alam dan Lingkungan Hidup**

- a) Penyusunan Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah
(SLHD)
➤ Anggaran Rp.38.122.500,- realisasi keuangan
Rp.38.115.500,- (99,98%) dan realisasi fisik (100%)
- b) Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Lingkungan
Hidup di Provinsi Kepulauan Riau
➤ Anggaran Rp.195.665.625,- realisasi keuangan
Rp.195.610.500,- (99,97%) dan realisasi fisik (100%)
- c) Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia Tahun 2017
➤ Anggaran Rp.144.222.875,- realisasi keuangan
Rp.142.966.100,- (99,13%) dan realisasi fisik (100%)
- d) Peningkatan Website dan Materi Publik Ekspose BLH
Provinsi Kepulauan Riau
➤ Anggaran Rp.48.918.750,- realisasi keuangan
Rp.47.269.000,- (96,63%) dan realisasi fisik (100%)
- e) Monitoring dan Evaluasi Pembinaan dan Pengawasan
Program dan Kegiatan Lingkungan Hidup
Kabupaten/Kota
➤ Anggaran Rp.275.557.700,- realisasi keuangan
Rp.275.385.200 (99,94%) dan realisasi fisik (100%)



f)Penyusunan Renstra DLHK Provinsi Kepulauan Riau Tahun

➤Anggaran 81.949.250,- realisasi keuangan Rp. 81.809.950 (99,83% dan realisasi fisik (100%)

7)Program Pengembangan, Pemanfaatan Rehabilitas dan Pengamanan Kawasan Hutan

a.Rehabilitas dan Reboisasi Hutan

➤Anggaran Rp.124.632.500,- realisasi keuangan Rp.121.228.750,- (97,27%) dan realisasi fisik (100%)

b.Pengawasan Peredaran Hasil Hutan Serta Pengamanan Kawasan Hutan

➤Anggaran Rp.364.980.000,- realisasi keuangan Rp.307.364.089,- (84,21%) dan realisasi fisik (100%)

c.Monitoring Perizinan Non Kehutanan yang Berbatas dengan Kawasan Hutan

➤Anggaran Rp.72.047.500,- realisasi keuangan Rp.69.343.726,- (96,25%) dan realisasi fisik (100%)

d.Penyusunan Desain Tapak Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam

➤Anggaran Rp.98.297.500,- realisasi keuangan Rp.95.118.500,- (96,77%) dan realisasi fisik (100%)

e.Operasional dan Penyusunan RPHJP Kesatuan PEngelolaan Hutan Produksi (KPHP) Karimun

➤Anggaran Rp.114.330.000,- realisasi keuangan Rp.110.670.300 (96,80%) dan realisasi fisik (100%)

f.Sosialisasi Peraturan Pengelolaan Hasil Hutan Kayu

➤Anggaran Rp.86.250.000,- realisasi keuangan Rp.75.610.050 (87,66%) dan realisasi fisik (100%)

g.Penelitian Terpadu Perubahan Fungsi dan Peruntukan Kawasan Hutan Pulau Asam

➤Anggaran Rp.400.000.000,- realisasi keuangan Rp.45.456.466 (11,36%) dan realisasi fisik (25%) (Kegiatan Setelah APBDP)

8)Program Pengembangan Data/Informasi

a.Kegiatan Survey, Verifikasi, dan Monitoring pada Kegiatan Hibah/Sosial SKPD

➤Anggaran Rp.54.830.600,- realisasi keuangan Rp.51.500.000,- (93,93%) dan realisasi fisik (100%)



b)Proses Perencanaan Pembangunan

Seluruh Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2017 merupakan hasil usulan yang berasal dari Renja SKPD dan telah dilakukan pembahasan dalam Forum MUSRENBANG Tingkat Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017.

c) Permasalahan dan Solusi

a.Permasalahan :

- 1) Sumber Daya Manusia yang bersifat teknis di DLHK Provinsi Kepulauan Riau relatif masih kurang, baik secara kuantitas maupun kualitas;
- 2) Kurangnya koordinasi antar bidang dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- 3) Fasilitas laboratorium lingkungan masih belum memadai;
- 4) Masih kurangnya pemahaman dan implementasi terhadap peraturan dan UU Lingkungan Hidup;
- 5) Kemampuan teknis kelembagaan dan SDM masih belum maksimal;
- 6) Peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan Kehutanan belum optimal.

b.Solusi :

- 1) Mengikut sertakan staf/karyawan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau dalam berbagai pendidikan, pelatihan, kursus-kursus, bimbingan teknis, dan lain-lain;
- 2) Mengagendakan rapat internal DLHK Provinsi Kepulauan Riau secara berkala;
- 3) Peningkatan fasilitas kantor sehingga dapat meningkatkan kinerja DLHK secara umum;
- 4) Pengadaan peralatan dan perlengkapan laboratorium sehingga dapat meningkatkan kinerja laboratorium;
- 5) Meningkatkan pengarusutamaan lingkungan hidup dalam berbagai sector;
- 6) Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan SDM melalui peningkatan kemitraan dengan Kementerian Lingkungan



Hidup dan Kehutanan dengan instansi lingkungan hidup dan Kehutanan di Kabupaten/Kota;

- 7) Meningkatkan peran serta masyarakat melalui kemitraan dan kemudahan akses informasi lingkungan hidup.

9. Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil

A. Program, Kegiatan, Alokasi dan Realisasi Keuangan serta Fisik

Seluruh program dan kegiatan urusan wajib bidang Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kepulauan Riau. Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi tersebut memiliki 1 (satu) program kerja dan 3 (tiga) kegiatan. Alokasi dana untuk urusan kependudukan dan pencatatan sipil tersebut pada tahun anggaran 2017 Rp. 1.860.485.000,- sedangkan realisasikeuangan sebesar Rp. 13.253.423.706,- dengan realisasi keuangan sebesar (91,85%) dan realisasi fisik sebesar (98,50%) dengan rincian alokasi anggaran dan realisasi per kegiatan sebagai berikut:

A. Program Penataan Administrasi Kependudukan

1. Kegiatan Pembangunan Warehouse Database kependudukan Prov. Kepri;
➤ Anggaran Rp. 292.920.000,- realisasi keuangan Rp. 273.944.968,- (93,52%) dan realisasi fisik 100%.
2. Kegiatan Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu (DAK)
➤ Anggaran Rp. 1.326.845.000,- realisasi keuangan Rp. 1.173.733.291,- (88,46%) dan realisasi fisik 100%.
3. Kegiatan Persiapan Implementasi Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)
➤ Anggaran Rp. 240.720.000,- realisasi keuangan Rp. 240.660.495,- (99,98%) dan realisasi fisik 100%.

B. Proses perencanaan pembangunan

- a. Seluruh Program dan Kegiatan merupakan hasil usulan yang berasal dari Renja SKPD dan telah dilakukan pembahasan dalam Forum MUSRENBANG Tingkat Provinsi Kepulauan Riau.



- b. Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Tentang Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021, merupakan tindak lanjut RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021.
- c. Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) merupakan rencana kerja tahunan meliputi program dan kegiatan serta anggaran yang diperlukan, dengan mempedomani RENSTRA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021, Hasil Reses DPRD Provinsi Kepulauan Riau serta hasil monitoring dan evaluasi sekaligus hasil koordinasi dengan Pemerintah Kab/Kota sehingga program dan kegiatan dapat saling bersinergi dan diharapkan hasil program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat bermanfaat kepada masyarakat secara efektif dan efisien.
- d. Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan.
- e. Rapat Kerja bersama DPRD Provinsi Kepulauan Riau (Komisi I) Pembahasan Program/Kegiatan serta Anggaran yang akan dilaksanakan.
- f. Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) selanjutnya untuk dilaksanakan sesuai dengan prioritas dan jadwal pelaksanaan yang telah ditetapkan.

c. Permasalahan dan solusi

a. Permasalahan :

Pelaksanaan program/kegiatan di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2017 telah selesai, namun terdapat beberapa hambatan yang dihadapi adalah:

1. Alokasi anggaran pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kepulauan Riau masih terbatas, untuk tahun 2017 ada beberapa kegiatan yang sudah dianggarkan ditunda atau dibatalkan sehingga kegiatan tersebut tidak bisa dijalankan. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kepulauan



Riau dianggap SKPD yang kurang prioritas namun demikian alokasi anggaran yang diberikan masih jauh dari optimal.

2. Masih terbatasnya SDM baik dari segi kuantitas maupun kualitas yang menangani tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kepulauan Riau.
3. Kemampuan teknis personil Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kepulauan Riau sebagian masih perlu ditingkatkan untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat.
4. Pengurus kelembagaan kemasyarakatan/masyarakat pedesaan masih terbatas tingkat pengetahuan dan keterampilan dalam keikutsertaan dalam mendukung pelaksanaan program/kegiatan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, mengingat program/kegiatan yang dilaksanakan sebagian besar bersifat partisipatif

b. Solusi :

1. Fasilitasi Kantor dan Ruang Rapat perlu dilakukan perbaikan sehingga lebih layak sebagai tempat aktifitas melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kepulauan Riau.
2. Meningkatkan kinerja dan performa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kepulauan Riau sehingga dapat memberikan sumbangsih dan kontribusi dalam perencanaan pembangunan daerah.
3. Hendaknya Badan Kepegawaian Daerah merekrut tenaga pegawai untuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kepulauan Riau secara berkala sehingga dapat memenuhi kebutuhan Dinas.
4. Merencanakan pelaksanaan program/kegiatan di wilayah tertentu dengan memperhatikan kondisi iklim/musim, sehingga dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

15. Komunikasi dan Informatika



1. Program, Kegiatan , Alokasi dan Realisasi Keuangan serta Fisik

Seluruh program dan kegiatan urusan wajib Komunikasi dan Informatika, urusan persandian dan statistik dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau. Alokasi dana untuk urusan Wajib pada tahun anggaran 2017 sebesar Rp. 17.224.514.399,20 yang terdiri dari Belanja tidak langsung sebesar Rp. 3.557.010.031,20 dan belanja langsung sebesar Rp. 13.667.504.368,00. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 14.178.616.058 (82,31%) dan realisasi fisik sebesar 91,17% dengan rincian alokasi anggaran dan realisasi per kegiatan sebagai berikut:

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini merupakan program pendukung untuk menunjang kinerja dari Dinas kominfo Provinsi Kepri.

41. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

- Anggaran Rp. 826.800.000 realisasi keuangan Rp. 789.875.000 (95,53 %) dan realisasi fisik 100%.

42. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung

- Anggaran Rp. 502.190.000 realisasi keuangan Rp. 502.190.000 (100%) dan realisasi fisik 100%.

43. Pelaksanaan Kegiatan Rutinitas Perkantoran

- Anggaran Rp. 2.325.760.424,- realisasi keuangan Rp. 2.239.108.359 (96,27%) dan realisasi fisik 100%.

b. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Program ini diperuntukkan untuk pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor sebagai pendukung pelaksanaan tugas.

1. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

- Anggaran Rp. 141.951.000 realisasi keuangan Rp. 134.878.855 (95,02 %) dan realisasi fisik 100%.

c. Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Program ini ditujukan untuk penyusunan laporan capaian kinerja di lingkungan dinas kominfo Prov. Kepri

1. Penyusunan laporan capaian kinerja di lingkungan dinas kominfo Prov. Kepri



- Anggaran Rp. 86.286.138 realisasi keuangan Rp. 86.238.250 (99,94 %) dan realisasi fisik 100%.

2. Penyusunan LAKIP

- Anggaran Rp. 26.782.375,- realisasi keuangan Rp. 26.759.375 (99,91%) dan realisasi fisik 100%.

d. Program penyelenggaraan informasi dan komunikasi public

Program ini merupakan program utama dinas kominfo, yang terdiri dari beberapa kegiatan.

1. Penyusunan bahan kebijakan di bidang komunikasi dan informasi public, TIK serta e-government
 - Anggaran Rp. 124.641.344, realisasi keuangan Rp. 122.223.544 (98,06%) dan realisasi fisik 100%.
2. Penyusunan DED interior dan eksterior layanan informasi public, KSP dan co working space
 - Anggaran Rp. 58.680.000, realisasi keuangan Rp. 58.125.000 (99,05%) dan realisasi fisik 100%.
3. Pembangunan layanan informasi public, KSP dan co working space
 - Anggaran Rp. 2.989.937.700, realisasi keuangan Rp. 766.593.260 (25,64%) dan realisasi fisik 100%.
4. Pengembangan dan updating website kominfo provinsi kepri
 - Anggaran Rp. 182.419.125, realisasi keuangan Rp. 181.809.624 (99,67%) dan realisasi fisik 100%.
5. Penyelesaian sengketa informasi KI Kepri
 - Anggaran Rp. 329.082.500, realisasi keuangan Rp. 328.690.900 (99,88%) dan realisasi fisik 100%.
6. Partisipasi media center dalam rangka mendukung FBK
 - Anggaran Rp. 0, realisasi keuangan Rp. 0 (0%) dan realisasi fisik 0%.
7. Peningkatan sinergitas daerah dalam implementasi transparansi komunikasi dan informasi public
 - Anggaran Rp. 0,00, realisasi keuangan Rp. 0,00 (0%) dan realisasi fisik 0%.
8. Pembuatan konten media dalam rangka layanan komunikasi dan informasi public
 - Anggaran Rp. 80.473.125, realisasi keuangan Rp. 80.374.005 (99,88%) dan realisasi fisik 100%.



9. Penguatan dan pengembangan KI Provinsi Kepri
 - Anggaran Rp. 1.121.610.000, realisasi keuangan (Rp) 1.079.069.828 (96,21%) dan realisasi fisik 100%.
10. Anugerah Keterbukaan informasi public
 - Anggaran Rp. 64.094.375, realisasi keuangan Rp. 60.341.548 (94,14%) dan realisasi fisik 100%.
11. Lomba karya jurnalistik transparansi dalam rangka hari HAK TaHu
 - Anggaran Rp. 80.021.250, realisasi keuangan Rp. 78.735.250 (98,39%) dan realisasi fisik 100%.
12. Visitasi dalam rangka pemeringkatan keterbukaan informasi pada badan public
 - Anggaran Rp. 81.948.750, realisasi keuangan Rp. 81.210.250 (99,10%) dan realisasi fisik 100%.
13. Penguatan dan pengembangan KPID Provinsi Kepri
 - Anggaran Rp. 1.476.163.210, realisasi keuangan Rp. 1.357.816.325 (91,98%) dan realisasi fisik 100%.
14. Anugerah penyiaran Provinsi Kepri
 - Anggaran Rp. 0,00, realisasi keuangan Rp. 0,00 (0%) dan realisasi fisik 0%.
15. Seleksi penerimaan dan pelantikan Komisioner KPID
 - Anggaran Rp. 259.488.750, realisasi keuangan Rp. 218.380.183 (84,16%) dan realisasi fisik 95%.
16. Literasi media di provinsi kepri
 - Anggaran Rp. 0,00, realisasi keuangan Rp. 0,00 (0%) dan realisasi fisik 0%.

e. Program pengelolaan e-government

1. Penyusunan Masterplan Kepri Digital gateway
 - Anggaran Rp. 1.107.473.750, realisasi keuangan Rp. 676.403.227 (61,08%) dan realisasi fisik 100%.
2. Pengadaan saran dan prasarana system informasi e-government
 - Anggaran Rp. 856.489.375, realisasi keuangan Rp. 851.275.542 (99,39%) dan realisasi fisik 100%.
3. Sosialisasi dan implementasi e-office di lingkungan pemprov kepri
 - Anggaran Rp. 148.278.562, realisasi keuangan Rp. 147.956.562 (99,78%) dan realisasi fisik 100%.
4. Percepatan implementasi e-government di provinsi kepri



- Anggaran Rp. 188.462.500, realisasi keuangan Rp. 183.031.047 (97,12%) dan realisasi fisik 100%.

5. Penyusunan SOP bidang kominfo

- Anggaran Rp. 53.916.250, realisasi keuangan Rp. 50.204.679 (93,12%) dan realisasi fisik 100%.

6. Pembuatan system aplikasi registrasi layanan informasi public

- Anggaran Rp. 0,00, realisasi keuangan Rp. 0,00 (0%) dan realisasi fisik 0%.

f. Program pengembangan data/informasi

Program ini adalah untuk mendukung urusan statistic.

1. Pendataan statistic bidang pembangunan se-kepri

- Anggaran Rp. 35.970.000, realisasi keuangan Rp. 35.913.500 (99,84%) dan realisasi fisik 100%.

g. Program persandian untuk pengamanan informasi

Program ini untuk mendukung urusan persandian.

1. Pelatihan system keamanan informasi e-government untuk ASN

- Anggaran Rp. 82.785.570, realisasi keuangan (Rp) 81.873.544 (98,90%) dan realisasi fisik 100%.

h. Program peningkatan disiplin aparatur

1. Pengadaan pakaian dinas aparatur

- Anggaran Rp. 0,00, realisasi keuangan Rp. 0,00 (0%) dan realisasi fisik 0%.

i. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Program ini merupakan fasilitasi peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

1. Penyediaan SDM dan peningkatan kompetensi untuk Layanan Informasi Publik Kepri Smart Province dan Co Working Space

- Anggaran Rp. 296.602.875, realisasi keuangan Rp. 282.533.353 (95,26%) dan realisasi fisik 100%.

2. Pelatihan Jurnalistik dan PPKP Dilingkungan Pemerintah Prov Kepri

- Anggaran Rp. 138.195.420, realisasi keuangan Rp. 137.904.420 (99,79%) dan realisasi fisik 100%.

2. Proses perencanaan pembangunan



Seluruh program dan kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau merupakan hasil usulan dari Renja SKPD dan telah dilakukan pembahasan dalam forum MUSRENBANG Tingkat Provinsi Kepulauan Riau.

3. Permasalahan dan solusi

a. Permasalahan;

- 7) Kurangnya jumlah SDM (PNS dan PTT) di Dinas Kominfo yang berlatar belakang IT.
- 8) Belum optimalnya pemanfaatan TIK
- 9) Kurangnya anggaran yang dialokasikan untuk Diskominfo Provinsi Kepri dalam melaksanakan tupoksinya, sehingga target yang ditentukan tidak tercapai.

b. Solusi;

- 8) Perlu penambahan jumlah SDM yang berlatar belakang IT dari BKD untuk di tempatkan di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau
- 9) Penambahan anggaran

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

Penggambaran penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah selama kurun waktu tahun 2017 di kelompokkan menjadi tiga bagian yaitu penggambaran capaian prioritas pembangunan daerah tahun 2017, capaian indikator aspek kesejahteraan masyarakat dan capaian indikator kinerja program dan realisasi anggaran per urusan.

A. Capaian Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2017



Indikator sasaran prioritas pembangunan daerah tahun 2017 terdapat sebanyak 108 indikator, 99 indikator dengan persentase realisasi kinerja memiliki status sangat tinggi (91,67%), 6 indikator memiliki status tinggi (5,56%), 1 indikator memiliki status sedang (0,93%), 1 indikator memiliki status rendah (0,93%) dan 1 indikator memiliki status sangat rendah (0,93%). Secara lengkap capaian indikator sasaran prioritas pembangunan daerah tahun 2017 per urusan dapat dilihat dari Tabel berikut ini.

Tabel 4.A.1.

Status Realisasi Indikator Sasaran
Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2017

No	Prioritas Pembangunan	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator	Satuan	Kinerja Tahun 2017				
							Target	Capaian	Persentase	Status	
1	Peningkatan pelayanan dasar masyarakat	Meningkatkan Kualitas sumberdaya manusia agar berpendidikan, berprestasi dan berdayasaing	Meningkatnya Ketersediaan, Keterjangkauan, Kualitas, Kesetaraan dan Kepastian pendidikan	•Program pendidikan menengah	Rata-rata Lama Sekolah	%	9,83	9,69	98,58	ST	
					Angka partisipasi kasar SMA sederajat	%	86,00	87,11	101,29	ST	
					Angka partisipasi murni SMA sederajat	%	75,50	75,87	100,49	ST	
				•Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Guru SMA/MA/SMK/MAK/SLB yang berkualifikasi S1/D4	%	90,00	90,15	100,17	ST	
			Meningkatnya prestasi pemuda dan olahraga	•Program peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Jumlah pemuda pelopor	Orang	700	2.287	326,71	ST	
				•Program pembinaan Dan pemasyarakatan Olahraga	Jumlah atlet berprestasi olahraga tingkat regional/nasional/internasional	Penghargaan	15	21	140,00	ST	
					Jumlah event olahraga tingkat daerah yang diselenggarakan masyarakat	Event	10	16	160,00	ST	
				Meningkatkan calon tenaga kerja yang terampil dan berdayasaing serta terpenuhi hak dan perlindungannya.	Meningkatnya kualitas, daya saing dan penempatan tenaga kerja, serta perlindungan terhadap tenaga kerja.	•Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	%	47,75	100,00	209,42
			Persentase Lulusan BLK yang diterima kerja				%	85	75,00	88,24	T
					•Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	7,16	7,16	100,00	ST
		Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang tinggi dengan pelayanan yang terjangkau dan berkualitas.	Meningkatnya status kesehatan dan gizi ibu dan anak, pengendalian penyakit menular dan tidak menular	•Program Kesehatan Masyarakat	Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 KH	per 100.000 KH	132	131	100,76	ST	
					Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 KH	per 1.000 KH	34	18	147,06	ST	
					Persentase kekurangan gizi (underweight) pada anak balita)	%	17,4	16,4	105,75	ST	
				•Program pencegahan dan pengendalian penyakit	Prevalensi HIV	%	<0.5	<0.5	100,00	ST	
					Angka Keberhasilan Pengobatan TB (success rate)	%	80	88	110,00	ST	
					Insidens rate DBD Per 100.000 penduduk	Per 100.000 penduduk	100	38,20	161,80	ST	



No	Prioritas Pembangunan	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator	Satuan	Kinerja Tahun 2017			
							Target	Capaian	Persentase	Status
			Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan rujukan	•Program pelayanan kesehatan	API (Annual Paracite Incidence) per 1.000 penduduk	per 1.000 penduduk	0,35	0,2	142,86	ST
					Status Akreditasi RSUD Provinsi Kepri Tanjungpinang (Versi KARS)	Status	Paripurna	Paripurna	100,00	ST
					Status Akreditasi RSUD Provinsi Kepri Tanjung Uban (Versi KARS)	Status	Paripurna	Paripurna	100,00	ST
		Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan	Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan	•Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Persentase anggaran responsive gender (ARG) terhadap belanja langsung APBD Provinsi	%	4,9	6,4	130,61	ST
				•Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Rasio kekerasan terhadap Perempuan termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)	per 100.000 Perempuan	33,16	27,7	119,71	ST
				•Program Perlindungan Anak	Persentase Kab/Kota yang melaksanakan KLA dengan pencapaian Peringkat Pratama	%	42,86	57	132,99	ST
		Meningkatkan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial,	Meningkatkan penanganan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial	•Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PMKS anak yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial berbasis lembaga (panti dan LKS)	%	0,23	0,24	105,67	ST
					Persentase lanjut usia terlanjar yang mendapatkan pelayanan sosial berbasis lembaga (panti dan LKS)	%	4,91	4,91	100,00	ST
					Persentase PMKS penyandang disabilitas yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial berbasis lembaga (panti dan LKS)	%	24,39	23,06	94,56	ST
					Persentase tunasosial yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial berbasis lembaga (panti dan LKS)	%	1,30	1,30	100,00	ST
					Persentase korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan perdagangan manusia yang mendapatkan rehabilitasi sosial berbasis lembaga (panti dan LKS)	%	44,69	44,76	100,15	ST
					Persentase korban bencana alam dan bencana sosial provinsi yang menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar	%	16,67	19,33	116,00	ST
				•Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase PMKS ruang lingkup Jaminan Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan bantuan langsung berkelanjutan dan/atau asuransi kesejahteraan sosial	%	30,36	30,36	100,00	ST
					Persentase lembaga/orsos penyelenggara pemberdayaan sosial yang mendapat pembinaan, bantuan,	%	20,40	20,40	100,00	ST



No	Prioritas Pembangunan	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator	Satuan	Kinerja Tahun 2017			
							Target	Capaian	Persentase	Status
					dan/atau fasilitas					
					Persentase tenaga kesejahteraan sosial masyarakat yang mendapat pembinaan, pelatihan, dan/atau fasilitas	%	8,12	8,12	100,00	ST
					Persentase pejuang, perintis kemerdekaan, dan keluarga pahlawan yang mendapat bantuan kesejahteraan sosial	%	100,00	100,00	100,00	ST
		Meningkatkan Ketahanan Pangan Masyarakat secara merata di seluruh kabupaten/kota	Meningkatkan ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan yang beragam, bergizi, berimbang dan aman serta terjangkau bagi masyarakat di seluruh wilayah	•Program Peningkatan Ketersediaan, Akses dan Distribusi Pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan	skor	89,00	83	93,36	ST
					Persentase maksimum koefisien harga pangan pokok (beras) di tingkat konsumen	%	10	9	108,70	ST
				•Program Penanganan Kerawanan Pangan	Angka Rawan Pangan	%	17,45	10	173,29	ST
				•Program Peningkatan Diversifikasi dan Pola Konsumsi Pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi	skor	86	88	102,79	ST
2	Peningkatan infrastruktur dasar dan keterhubungan antar wilayah	Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dan keterhubungan antar wilayah dan antar pulau untuk mendukung pertumbuhan wilayah secara merata	Terhubungnya antar pulau dan antar kabupaten/kota di wilayah provinsi	•Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Darat	Persentase ketersediaan Pelabuhan Penyeberangan (roro)	%	71,43	71,43	100,00	ST
					Persentase ketersediaan Kapal Penyeberangan (roro)	%	77,78	77,78	100,00	ST
					Persentase pelayanan jaringan trayek angkutan penyeberangan perintis	%	53,85	53,85	100,00	ST
				•Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Laut	Persentase ketersediaan Pelabuhan Laut	%	64,71	58,82	90,89	ST
				•Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Udara	Persentase ketersediaan jaringan trayek angkutan udara perintis	%	75,00	75,00	100,00	ST
			Meningkatkan kuantitas dan kualitas jalan dan jembatan Provinsi	•Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Persentase jalan provinsi berkondisi baik	%	67,97	67,30	99,01	ST
					Persentase jembatan kondisi baik	%	79,88	80,11	100,29	ST
		Meningkatkan ketersediaan sarana prasarana pengairan untuk mendukung produktivitas pertanian	Meningkatkan fungsi sarana prasarana pengairan (irigasi)	•Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Persentase Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada	%	39,64	35,05	88,43	T
		Meningkatkan penyediaan prasarana dan sarana dasar masyarakat agar dapat hidup secara layak	Meningkatkan kapasitas dan fungsi sanitasi dan air bersih/minum	•Program Peningkatan Pemenuhan Akses Sanitasi	Cakupan pelayanan Sanitasi:					
					Air Limbah	%	85,45	86,41	101,12	ST
					Persampahan	%	56,00	56,00	100,00	ST
					Drainase	%	32,24	32,24	100,00	ST
				•Program pengembangan kinerja pengelolaan air	Persentasi pelayanan akses air bersih/minum yang aman (%)	%	89,44	89,44	100,00	ST



No	Prioritas Pembangunan	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator	Satuan	Kinerja Tahun 2017			
							Target	Capaian	Persentase	Status
				bersih/air minum						
			Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman dan perumahan di kawasan perkotaan dan perdesaan	•Program Peningkatan Dukungan Layanan Dasar Permukiman dan Perumahan	Luas kawasan kumuh	ha	752,99	752,62	100,05	ST
			Meningkatkan rasio elektrifikasi	•Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	Rasio elektrifikasi	%	89,15	91,44	102,57	ST
		Meningkatkan kualitas lingkungan hidup, pengelolaan, pelestarian hutan, dan penanganan lahan kritis secara berkelanjutan	Berkurangnya kerusakan lingkungan, terkelolanya hutan dan laut secara lestari, dan berkurangnya lahan kritis secara berkelanjutan.	•Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Angka	67,70	70,19	103,68	ST
				•Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Jumlah Sekolah yang memperoleh penghargaan Adiwiyata Provinsi dan atau tingkat Nasional	Sekolah	23	25	108,70	ST
					Luas kawasan mangrove yang terehabilitasi	ha	2	2	100,00	ST
				•Program Pengembangan, dan Pemanfaatan Kawasan Hutan	Luas lahan kritis terehabilitasi	ha	243	243	100,00	ST
				•Program pengembangan perikanan tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	304.019,32	304.038,71	100,01	ST
				•Program pengembangan budidaya perikanan	Jumlah produksi perikanan budidaya	Ton	33.649,95	34.302	101,94	ST
				•Program Penguatan Daya Saing Hasil Perikanan	Jumlah produk olahan Hasil perikanan (Ton)	Ton	1.320,94	1.902,48	144,02	ST
3	Pengembangan sektor maritim dan pariwisata	Meningkatkan produksi perikanan, budidaya, perikanan tangkap, dan hasil olahan perikanan	Meningkatkan produksi perikanan dan hasil olahan perikanan	•Program Pengelolaan Sumber Daya Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Produk peraturan perundang-undangan tentang pengaturan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan	Dokumen/Peraturan	1 (dok. pendukung RZWP3K)	1 (dok. pendukung RZWP3K)	100,00	ST
				•Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	% Jumlah kasus Iuu Fishing / konflik pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang diselesaikan	%	100	89	89,00	T
				•Program Pengembangan Pemasaran pariwisata	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Kepulauan Riau	Juta orang	2,2	2,07	94,30	ST
		Menjaga Kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan	Lestari nya sumber daya kelautan dan perikanan							
4	Mengembangkan perikehidupan masyarakat yang	Melestarikan Nilai-Nilai dan Seni Budaya Melayu guna	Meningkatkan kelestarian nilai-nilai dan seni budaya	•Program Pengembangan Nilai Budaya	Persentase bangunan yang berciri khas melayu	%	6,02	7,28	120,93	ST
					Presentase Nilai Adat dan tradisi yang digali diaktualisasi dan revitalisasi	%	8,87	10,20	114,99	ST



No	Prioritas Pembangunan	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator	Satuan	Kinerja Tahun 2017			
							Target	Capaian	Persentase	Status
	agamis, demokratis, berkeadilan, tertib, rukun dan aman di bawah payung budaya Melayu.	Mewujudkan Masyarakat Kepulauan Riau yang berkepribadian dan Berakhlak Mulia.	melayu sebagai kekayaan budaya daerah	•Program pengelolaan kekayaan budaya.	Persentase warisan budaya tangible yang lestari	%	19,58	19,58	100,00	ST
				•Program pengelolaan keragaman budaya	Persentase Organisasi Budaya Berkategori Maju	%	14,49	14,49	100,00	ST
					Persentase Sanggar seni yang aktif mengajarkan kesenian dan tradisi lokal	%	6,49	6,49	100,00	ST
			Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai agama	•Program Pembinaan, Fasilitasi, Peningkatan, Pemahaman, Penghayatan, Pengamalan dan Pengembangan Nilai-Nilai Keagamaan	Persentase pelaksanaan hari-hari besar keagamaan	%	100	100	100,00	ST
5	Peningkatan ekonomi produktif	Meningkatkan minat dan realisasi investasi di provinsi Kepulauan Riau	Meningkatkan realisasi investasi domestik dan investasi asing, pelayanan perijinan, serta kebijakan yang menjamin kepastian hukum bagi pelaku usaha	•Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Jumlah Investor Dalam Negeri	Investor	135	291	215,56	ST
					Jumlah Investor Luar Negeri	Investor	100	203	203,00	ST
				•Program peningkatan iklim Investasi Dan Realisasi Investasi	Jumlah Nilai realisasi investasi (PMA)	Rupiah Milyar	7.300	13.823	189,36	ST
					Jumlah Nilai realisasi investasi (PMDN)	Rupiah Milyar	500	1.398	280,00	ST
		Meningkatkan kemandirian dan daya saing koperasi dan UKM sebagai usaha ekonomi rakyat	Meningkatkan kualitas dan kuantitas koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah	•Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase koperasi aktif	%	51,2	51,8	101,17	ST
					Persentase KSP/USP sehat	%	15,3	8,4	54,90	R
				•Program Peningkatan Daya Saing UKM dan koperasi	Persentase Koperasi dan UKM yang memiliki Produk diterima dipasar modern atau tersertifikasi	%	18,5	19,8	107,03	ST
		Meningkatkan ekspor dan produktivitas industri berbahan baku lokal	Meningkatkan kuantitas dan omset produksi industri pengolahan berbasis bahan baku lokal	•Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial	Jumlah Sentra Industri dilengkapi Infrastruktur penunjang	Sentra	6	6	100,00	ST
				•Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Jumlah industri menengah dan besar	unit	2.000	2.000	100,00	ST
					Jumlah industri berbahan baku lokal	unit	1.720	1.750	101,74	ST
			Meningkatkan kinerja sektor perdagangan dan sarana prasarana perdagangan, serta pengamanan perdagangan.	•Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor.	Nilai ekspor produk-produk berbahan baku lokal asal Kepri	juta US \$	1.258,94	2.915,73	231,60	ST
					Nilai ekspor Non Migas Provinsi Kepulauan Riau	Ribu US \$	8.557.950,00	8.654.141,65	101,12	ST
					Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	%	8,19	7,00	85,47	T
		Meningkatkan Produksi	Meningkatkan	•Program peningkatan	Nilai tukar petani	%	97,50	97,98	100,49	ST



No	Prioritas Pembangunan	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator	Satuan	Kinerja Tahun 2017			
							Target	Capaian	Persentase	Status
		dan Produktivitas Pertanian, perkebunan dan peternakan guna memenuhi kebutuhan masyarakat.	produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan dan peternakan	kesejahteraan Petani						
				•Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Jumlah Produksi Padi	ton	792	601,00	75,88	S
					Jumlah Produksi Tanaman Palawija	ton	12.367	19.531,50	157,94	ST
					Jumlah Produksi Tanaman Komoditas Hortikultura	ton	39.936	40.301,00	100,91	ST
					Jumlah produksi Tanaman Perkebunan	ton	31.338	47.930,00	152,95	ST
				•Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Persentase Produk Pangan Asal Hewan yang Aman dan Sehat	%	54,90	78,84	143,61	ST
				•Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Persentase Peningkatan Populasi Ternak	%	6,00	4,67	77,83	T
6	Pengentasan kemiskinan	Menurunkan angka kemiskinan baik di wilayah perdesaan maupun perkotaan	Menurunkan persentase penduduk miskin	•Program penanggulangan kemiskinan	Persentase keluarga miskin yang menerima bantuan melalui mekanisme Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	%	0,61	0,61	100,00	ST
					Persentase keluarga miskin yang menerima bantuan kesejahteraan sosial lainnya	%	51,53	51,53	100,00	ST
			Meningkatkan keberdayaan ekonomi masyarakat dan kelembagaan masyarakat perdesaan	•Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) yang aktif	Unit BUMDesa	35	35	100,00	ST
				•Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang telah aktif	%	40,22	40,00	99,44	ST
		Meningkatkan keterpaduan pembangunan wilayah perbatasan	Meningkatkan pembangunan wilayah perbatasan	•Program pengembangan wilayah perbatasan	Persentase Fasilitas Penyelesaian Batas Darat Kab/Kota	%	85	85	100,00	ST
7	Tatakelola pemerintahan	Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas SDM aparatur	Meningkatkan kemampuan, profesionalitas dan etos kerja aparatur pemerintah	•Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	Persentase peningkatan Kompetensi ASN melalui pengembangan kompetensi	%	14,07	17,17	122,03	ST
				•Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Penurunan Kasus Indisipliner Pegawai Tingkat Sedang dan Berat	Kasus	16	15	93,75	ST
					Persentase ASN yang Memiliki Penilaian Kinerja Baik	%	90	92,70	103,00	ST
					Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi dan Administrasi yang Menduduki Jabatan sesuai dengan Syarat dan Kompetensi Jabatan	%	78	97,02	124,38	ST
		Meningkatkan Kualitas Pelayanan pada unit-unit pelayanan publik berbasis teknologi informasi	Meningkatkan kualitas pelayanan publik, pengelolaan informasi publik, dan penerapan e-government	•Program pengembangan e-government	Nilai e- government Provinsi Kepri	Skala nilai 1-4	2,1	2,1	100,00	ST
				•Program peningkatan kualitas pelayanan dan informasi publik	Persentase SOP pada slrh OPD yang telah diimplementasikan	%	78	78	100,00	ST



No	Prioritas Pembangunan	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator	Satuan	Kinerja Tahun 2017			
							Target	Capaian	Persentase	Status
			Meningkatnya pelayanan perpustakaan Provinsi Kepulauan Riau	•Program pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Persentase Peningkatan Pengunjung Perpustakaan	%	21,84	27,65	126,61	ST
			Meningkatnya tata kelola jaminan keamanan informasi menggunakan persandian (aspek kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian dan/atau nir-sangkal)	•Program Persandian untuk Pengamanan Informasi	Persentase Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Persandian untuk Pengamanan Informasi per program)	%	10	2,5	25,00	SR
		Meningkatkan kinerja pemerintahan dan kualitas perencanaan pembangunan daerah	Meningkatnya prestasi kinerja pemerintah provinsi Kepulauan Riau	•Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Daerah	Peringkat Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi (LPPD)	Peringkat	Tinggi	Tinggi	100,00	ST
				•Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Daerah	Peringkat Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi (LPPD)	Peringkat	Tinggi	Tinggi	100,00	ST
		Meningkatkan kapasitas fiskal daerah dalam membiayai pembangunan, dan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah provinsi dan kabupaten/kota	Meningkatnya pendapatan daerah, dan terwujudnya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), APBD, dan LPP APBD Provinsi dan kabupaten/kota yang tepat waktu dan akuntabel	•Program intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah	Realisasi Pendapatan Asli Daerah	Trilyun Rupiah	1,213	1,091	89,94	T
				•Program Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK atas LKPD Provinsi Kepulauan Riau	Status	WTP	WTP	100,00	ST
				•Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Daerah	Level Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Level	3	3	100,00	ST
		Meningkatkan keamanan, ketenteraman, ketertiban, kerukunan, dan nasionalisme di masyarakat	Terciptanya lingkungan yang aman, tenteram, tertib dan kondusif serta meningkatnya jiwa nasionalisme masyarakat	•Program Penerapan dan Penegakan Hukum serta HAM	Jumlah Pelanggaran Peraturan Daerah Dan Peraturan Gubernur	kasus	250	240	104,00	ST
				•Program Pemeliharaan Kantrantibas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Persentase demo yang berjalan aman	%	92	92	100,00	ST
				•Program pengembangan wawasan kebangsaan	Persentase konflik sosial tertangani	%	100,00	100	100,00	ST

Keterangan:

Sangat Tinggi (ST) : Persentase realisasi indikator kinerja pembangunan lebih dari/atau sama dengan 91%
Tinggi (T) : Persentase realisasi indikator kinerja pembangunan antara 76% hingga kurang dari 90%
Sedang (S) : Persentase realisasi indikator kinerja pembangunan antara 66% hingga kurang dari 75%



Rendah (R) : Persentase realisasi indikator kinerja pembangunan antara 51% hingga kurang dari 65%
Sangat Rendah (SR) : Persentase realisasi indikator kinerja pembangunan kurang dari/atau sama dengan 50%

B. Capaian Indikator Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Indikator Agregat dalam dokumen RPJMD Bab IX terdapat 5 indikator. Terdapat 1 indikator kinerja yang capaiannya belum tersedia sampai dengan tahun 2017 yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) belum dirilis oleh BPS sehingga sementara menggunakan data tahun 2016. Dari sebanyak 5 indikator yang ditargetkan, seluruhnya sebanyak 5 indikator dengan persentase realisasi kinerja memiliki status sangat tinggi. Secara lengkap capaian indikator aspek kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari Tabel berikut ini.

Tabel 4.A.2.
Status Realisasi Aspek Kesejahteraan Masyarakat
Tahun 2017

No	Program & Indikator Kinerja RPJMD	Satuan	Kondisi Awal RPJMD		Tahun 2017								
					Target	Realisasi	Persentas Realisasi Kinerja	Status					
			Tahun 2015	Tahun 2016				SR	R	S	T	ST	tad
1	Pertumbuhan Ekonomi	%	6,02	5,03	2,2-2,6	2,41	109,55					✓	
2	Laju Inflasi	%	4,40	3,53	4,02	4,02	100,00					✓	
3	Indeks Gini	%	0,34	0,35	0,36	0,359	100,28					✓	
4	Persentase penduduk miskin	%	5,78	5,84	6,13	6,13	100,00					✓	
5	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	73,75	73,99	74,61	73,99*)	99,16					✓	

Keterangan:

*) Data Tahun 2016

Sangat Tinggi (ST) : Persentase capaian target 2017 lebih dari/atau sama dengan 91%
Tinggi (T) : Persentase capaian target 2017 antara 76% hingga 90%

Sedang (S) : Persentase capaian target 2017 antara 66% hingga 75%
Rendah (R) : Persentase capaian target 2017 antara 51% hingga 65%

Sangat Rendah (SR) : Persentase capaian target 2017 kurang dari/atau sama dengan 50%

D. Rekapitulasi Status Capaian Target Indikator Kinerja Program
Tahun 2017

Capaian indikator kinerja program pembangunan Provinsi Kepulauan Riau yang ditargetkan pada tahun 2017 sebanyak 312 indikator dari 39 urusan dibandingkan terhadap target akhir tahun RPJMD tahun 2017, yaitu terdapat sebanyak 274 indikator dengan status SangatTinggi, selanjutnya 16 indikator berstatus Tinggi, 7 indikator berstatus Sedang, 2 indikator berstatus Rendah, dan 13 indikator. Secara rinci status realisasi indikator kinerja program pembangunan Provinsi Kepulauan Riau menurut urusan pada tahun 2017 dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 4.D.1.
Status Realisasi Indikator Kinerja Program Pembangunan
Menurut Urusan
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017

No	URUSAN	JUMLAH INDIKATOR KINERJA RPJMD TAHUN 2017	STATUS					STATUS KINERJA BAIK (TINGGI DAN SANGAT TINGGI)	
			SANGAT RENDAH	RENDAH	SEDANG	TINGGI	SANGAT TINGGI	TINGGI DAN SANGAT TINGGI	%
1	Pendidikan	14				1	13	14	100,00
2	Kesehatan	25				1	24	25	100,00
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	12	1			1	10	11	91,67
4	Perumahan dan Kawasan Permukiman	6					6	6	100,00
5	Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat	10			1	1	8	9	90,00
6	Sosial	17					17	17	100,00
7	Tenaga Kerja	11	1			4	6	10	90,91
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	5					5	5	100,00
9	Pangan	6					6	6	100,00
10	Pertanahan	1					1	1	100,00
11	Lingkungan Hidup	9					9	9	100,00
12	Administrasi Kependudukan Dan Catatan Sipil	2					2	2	100,00
13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	4					4	4	100,00
14	Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	1					1	1	100,00
15	Perhubungan	14	1			2	11	13	92,86
16	Komunikasi dan Informatika	3	1				2	2	66,67
17	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	5		1			4	4	80,00
18	Penanaman Modal	6					6	6	100,00
19	Kepemudaan dan Olahraga	6			1		5	5	83,33
20	Statistik	0						0	0,00
21	Persandian	1	1					0	0,00
22	Kebudayaan	5					5	5	100,00
23	Perpustakaan	3					3	3	100,00
24	Kearsipan	2					2	2	100,00
25	Kelautan dan Perikanan	9				2	7	9	100,00
26	Pariwisata	6					6	6	100,00
27	Pertanian	12			3	2	7	9	75,00
28	Kehutanan	4	1				3	3	75,00
29	Energi dan Sumber Daya Mineral	8					8	8	100,00
30	Perdagangan	9					9	9	100,00
31	Perindustrian	10					10	10	100,00
32	Transmigrasi	2					2	2	100,00
33	Sekretariat Daerah	42	6	1	1		34	34	80,95
34	Sekretariat DPRD	5					5	5	100,00
35	Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	6					6	6	100,00
36	Pengawasan	9			1		8	8	88,89
37	Perencanaan Pembangunan	10				1	9	10	100,00
38	Penelitian dan Pengembangan	1					1	1	100,00
39	Kuangan Daerah	11	1			1	9	10	90,91
	Jumlah	312	13	2	7	16	274	290	92,95



BAB V

TUGAS PEMBANTUAN

A. Tugas Pembantuan Yang Diterima

1. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau.

Tugas Pembantuan (TP) yang diterima oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2017 ada 5 DIPA, yaitu dapat kami jabarkan sebagai berikut :

(1) Dasar Hukum Tugas Pembantuan (TP)

Adapun yang menjadi dasar hukum tugas pembantuan adalah sebagai berikut :

- 1)DIPA Nomor : DIPA-018.04.4.320088/2017
- 2)DIPA Nomor : DIPA-018.05.4.329079/2017
- 3)DIPA Nomor : DIPA-018.06.4.329080/2017
- 4)DIPA Nomor : DIPA-018.06.4.329082/2017



5)DIPA Nomor : DIPA-018.03.4.329077/2017

(2) Instansi Pemberi Tugas Pembantuan (TP)

Program dan Kegiatan berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara / APBN Kementerian Pertanian RI. Dapat kami rincikan berdasarkan sumbernya DIPA tersebut berasal dari, sebagai berikut :

- 1)DIPA Nomor : DIPA Nomor : SP DIPA-018.04.4.320088/2017 merupakan Tugas Perbantuan (TP) dari Ditjen Hortikultura Kementerian Pertanian Republik Indonesia.
- 2)DIPA Nomor : SP DIPA-018.05.4.329079/2017 merupakan Tugas Perbantuan (TP) dari Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian Republik Indonesia.
- 3)DIPA Nomor : SP DIPA-018.06.4.329080/2017 merupakan Tugas Perbantuan (TP) dari Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Republik Indonesia.
- 4)DIPA Nomor : SP DIPA-018.08.4.329082/2017 merupakan Tugas Perbantuan (TP) dari Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia.
- 5)DIPA Nomor : SP DIPA-018.03.4.329077/2017 merupakan Tugas Perbantuan (TP) dari Ditjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Republik Indonesia.

(3) Program dan Kegiatan Tugas Pembantuan (TP)

Program dan Kegiatan Tugas Pembantuan yang diterima dapat kami uraikan sebagai berikut :

- (1)DIPA Nomor : SP DIPA-018.04.4.320088/2017 merupakan Tugas Perbantuan (TP) dari Ditjen Hortikultura Kementerian Pertanian Republik Indonesia dengan Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Hortikultura Ramah Lingkungan. DIPA ini mempunyai 3 (tiga) kegiatan yaitu Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat, Pengembangan Sistem Perbenihan dan Peningkatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura.
- (2)DIPA Nomor : : SP DIPA-018.05.4.329079/2017 merupakan Tugas Perbantuan (TP) dari Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian Republik Indonesia dengan satu program yaitu Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan. DIPA ini mempunyai 2 (dua) kegiatan yaitu :
 - ✓Dukungan Perlindungan Perkebunan



- ✓ Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan

(3) DIPA Nomor : SP DIPA-018.06.4.329080/2017 merupakan Tugas Perbantuan (TP) dari Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Republik Indonesia dengan satu program yaitu Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat. DIPA ini mempunyai 3 (tiga) kegiatan yaitu :

- ✓ Peningkatan Produksi Pakan Ternak
- ✓ Penyediaan Benih dan Bibit Serta Peningkatan Produksi Ternak
- ✓ Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan

(4) DIPA Nomor : SP DIPA-018.08.4.329082/2017 merupakan Tugas Perbantuan (TP) dari Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia dengan Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian. Program dalam DIPA ini mempunyai 4 (empat) kegiatan yaitu :

- ✓ Perluasan dan Perlindungan Lahan Pertanian.
- ✓ Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian.
- ✓ Fasilitasi Pupuk dan Pestisida
- ✓ Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian

(5) DIPA Nomor : SP DIPA-018.03.4.329077/2017 merupakan Tugas Perbantuan (TP) dari Ditjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Republik Indonesia dengan Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan. Program dalam DIPA ini mempunyai 4 (empat) kegiatan yaitu :

- ✓ Pengelolaan Produksi Tanaman Sereal.
- ✓ Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan.
- ✓ Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
- ✓ Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Ubi

(4) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Dari seluruh DIPA APBN yang merupakan Tugas Perbantuan (TP) yang diberikan kepada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau, diperoleh total pagu awal adalah RP. 48.988.233.000,-. Sampai akhir tahun anggaran 2017 secara keuangan terealisasi Rp. 24.566.468.991,- atau secara persentase keuangan 50,15% dan realisasi secara fisik



kegiatan 86,37%. Realisasi keuangan dan Fisik DIPA Tugas Pembantuan APBN Tahun Anggaran 2017 dapat dijabarkan sebagai berikut :

1) DIPA Nomor : SP DIPA-018.04.4.320088/2017 merupakan Tugas Perbantuan (TP) dari Ditjen Hortikultura Kementerian Pertanian Republik Indonesia dengan Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Hortikultura Ramah Lingkungan. Program ini mempunyai pagu awal anggaran Rp. 7.724.000.000,- Realisasi keuangan sampai akhir tahun anggaran 2017 Rp. 6.885.090.100,- atau secara persentase keuangan sebesar 89,14%. Dilihat fisik pekerjaannya terealisasi sebesar 100 %. Realisasi jika dirinci menurut kegiatan, dapat diuraikan sebagai berikut dibawah ini yaitu :

(a) Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat. Kegiatan ini mempunyai pagu anggaran Rp. 7.310.000.000,-. Sampai akhir tahun anggaran 2017 terealisasi Rp. 6.602.173.500,- atau secara persentase keuangan sebesar 90,32%. Dilihat fisik pekerjaannya terealisasi sebesar 100%.

(b) Pengembangan Sistem Perbenihan. Kegiatan ini mempunyai pagu anggaran Rp. 776.250.000,- Sampai akhir tahun anggaran 2017 terealisasi Rp. 684.075.000,- atau secara persentase keuangan sebesar 88,13%. Dilihat fisik pekerjaannya terealisasi sebesar 100%.

(c) Peningkatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura. Kegiatan ini mempunyai pagu anggaran Rp. 414.000.000,- Sampai akhir tahun anggaran 2017 terealisasi Rp. 282.916.600,- atau secara persentase keuangan sebesar 68,34%. Dilihat fisik pekerjaannya terealisasi sebesar 100%.

2) DIPA Nomor : SP DIPA-018.05.4.329079/2017 merupakan Tugas Perbantuan (TP) dari Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian Republik Indonesia dengan Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan. Program ini mempunyai pagu anggaran Rp. 406.126.000,-. Realisasi keuangan sampai akhir tahun anggaran 2017 Rp. 323.571.300,- atau secara persentase keuangan sebesar 79,67%. Dilihat fisik pekerjaannya terealisasi sebesar 100%. Realisasi jika dirinci menurut kegiatan, dapat diuraikan sebagai berikut dibawah ini yaitu :

a) Dukungan Perlindungan Perkebunan. Kegiatan ini mempunyai pagu anggaran Rp. 13.000.000,-. Sampai akhir tahun anggaran 2017



teralisasi Rp. 12.520.000,- atau secara persentase keuangan sebesar 96,31%. Dilihat fisik pekerjaannya terealisasi sebesar 100%.

b) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan. Kegiatan ini mempunyai pagu anggaran Rp. 393.126.000,-. Sampai akhir tahun anggaran 2017 terealisasi Rp. 311.051.300,- atau secara persentase keuangan sebesar 79,12%. Dilihat fisik pekerjaannya terealisasi sebesar 100%.

3) DIPA Nomor : SP DIPA-018.06.4.329080/2017 merupakan Tugas Perbantuan (TP) dari Ditjen Peternakan Dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Republik Indonesia dengan Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat. Program ini mempunyai pagu anggaran Rp. 3.507.747.000,-. Realisasi keuangan sampai akhir tahun anggaran 2017 Rp. 2.287.443.200,- atau secara persentase keuangan sebesar 65,21 %. Dilihat fisik pekerjaannya terealisasi sebesar 83,33 %. Realisasi jika dirinci menurut kegiatan, dapat diuraikan sebagai berikut dibawah ini yaitu:

a) Peningkatan Produksi Pakan Ternak. Kegiatan ini mempunyai pagu anggaran Rp. 1.320.000.000,-. Sampai akhir tahun anggaran 2017 terealisasi Rp. 224.584.000,- atau secara persentase keuangan sebesar 17,01%. Dilihat fisik pekerjaannya terealisasi sebesar 50,00%.

b) Penyediaan Benih dan Bibit Serta Peningkatan Produksi Ternak. Kegiatan ini mempunyai pagu anggaran Rp. 2.087.747.000,-. Sampai akhir tahun anggaran 2017 terealisasi Rp. 1.962.868.200,- atau secara persentase keuangan sebesar 94,02%. Dilihat fisik pekerjaannya terealisasi sebesar 100,00%.

c) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan. Kegiatan ini mempunyai pagu anggaran Rp. 100.000.000,-. Sampai akhir tahun anggaran 2017 terealisasi Rp. 99.991.000,- atau secara persentase keuangan sebesar 99,99%. Dilihat fisik pekerjaannya terealisasi sebesar 100,00%.

4) DIPA Nomor : SP DIPA-018.08.4.329082/2017 merupakan Tugas Perbantuan (TP) dari Ditjen Prasarana Dan Sarana Pertanian Republik Indonesia dengan ogram Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian. Program ini mempunyai pagu anggaran Rp. 35.802.660.000,-. Realisasi keuangan sampai akhir



tahun anggaran 2017 Rp. 13.833.352.991,- atau secara persentase keuangan sebesar 38,64 %. Dilihat fisik pekerjaannya terealisasi sebesar 49,50 %. Realisasi jika dirinci menurut kegiatan, dapat diuraikan sebagai berikut dibawah ini yaitu:

a) Perluasan dan Perlindungan Lahan Pertanian. Kegiatan ini mempunyai pagu anggaran Rp. 34.201.820.000,-. Sampai akhir tahun anggaran 2017 terealisasi Rp. 13.351.603.800,- atau secara persentase keuangan sebesar 39,04%. Dilihat fisik pekerjaannya terealisasi sebesar 49,00%.

b) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian. Kegiatan ini mempunyai pagu anggaran Rp. 732.740.000,-. Sampai akhir tahun anggaran 2017 terealisasi Rp. 333.119.891,- atau secara persentase keuangan sebesar 45,46%. Dilihat fisik pekerjaannya terealisasi sebesar 55,50%.

c) Fasilitas Pupuk dan Pestisida. Kegiatan ini mempunyai pagu anggaran Rp. 764.100.000,-. Sampai akhir tahun anggaran 2017 terealisasi Rp. 148.629.300,- atau secara persentase keuangan sebesar 19,45%. Dilihat fisik pekerjaannya terealisasi sebesar 29,50%.

d) Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian. Kegiatan ini mempunyai pagu anggaran Rp. 104.000.000,-. Sampai akhir tahun anggaran 2017 terealisasi Rp. 11.264.000,- atau secara persentase keuangan sebesar 10,83%. Dilihat fisik pekerjaannya terealisasi sebesar 21,00%.

5) DIPA Nomor : SP DIPA-018.03.4.329077/2017 merupakan Tugas Perbantuan (TP) dari Ditjen Tanaman Pangan Republik Indonesia dengan Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan. Program ini mempunyai pagu anggaran Rp. 1.547.700.000,-. Realisasi keuangan sampai akhir tahun anggaran 2017 Rp. 1.237.011.400,- atau secara persentase keuangan sebesar 79,93 %. Dilihat fisik pekerjaannya terealisasi sebesar 100,00 %. Realisasi jika dirinci menurut kegiatan, dapat diuraikan sebagai berikut dibawah ini yaitu:

a) Pengelolaan Produksi Tanaman Sereal. Kegiatan ini mempunyai pagu anggaran Rp. 609.970.000,-. Sampai akhir tahun anggaran 2017 terealisasi Rp. 358.760.000,- atau secara persentase keuangan sebesar 58,82%. Dilihat fisik pekerjaannya terealisasi sebesar 100,00%.



- b) Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan. Kegiatan ini mempunyai pagu anggaran Rp. 92.540.000,-. Sampai akhir tahun anggaran 2017 terealisasi Rp. 82.835.000,- atau secara persentase keuangan sebesar 89,51%. Dilihat fisik pekerjaannya terealisasi sebesar 100,00%.
- c) Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan. Kegiatan ini mempunyai pagu anggaran Rp. 678.840.000,-. Sampai akhir tahun anggaran 2017 terealisasi Rp. 629.860.400,- atau secara persentase keuangan sebesar 92,78%. Dilihat fisik pekerjaannya terealisasi sebesar 100,00%.
- d) Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Ubi. Kegiatan ini mempunyai pagu anggaran Rp. 166.350.000,-. Sampai akhir tahun anggaran 2017 terealisasi Rp. 165.556.000,- atau secara persentase keuangan sebesar 99,52%. Dilihat fisik pekerjaannya terealisasi sebesar 100,00%.

(5) Satuan Pelaksana Tugas Pembantuan (TP)

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melaksanakan Tugas Pembantuan (TP) adalah Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau (yaitu bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, bidang Perkebunan, bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan).

(6) Kondisi Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana pendukung yang ada dimiliki Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau seperti komputer/pc, laptop/notebook, printer, faximile, meja kerja, kursi kerja, lemari arsip, sarana laboratorium, obat-obatan dan sarana pendukung lainnya. Sarana lain berupa UPTD Pusat Kesehatan Hewan dan Laboratorium Diagnostik Keswan dan Kesmavet serta penambahan UPTD Balai Benih Induk Pertanian dan Kehutanan yang berlokasi di Tembeling Kecamatan Toapaya Kabupaten Bintan.

(7) Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

- (1) Sektor pertanian belum berkembang ditandai kebutuhan pangan, buah-buahan dan sayuran didatangkan dari Provinsi lain bahkan impor, akibat ketersediaan lahan terbatas, kondisi tanah kurang subur, daya dukung sumberdaya air yang kurang, minat petani semakin menurun, penerapan teknologi yang masih rendah (masih



konvensional), jumlah penyuluh pertanian yang masih kurang dan terbatasnya sarana prasarana penyuluhan.

(2) Dari sektor perkebunan, kendala utama pengembangan komoditi dan produksinya adalah :

a) Banyaknya tanaman tua, sehingga produksi dan produktivitas mengalami penurunan.

b) Tidak adanya peremajaan tanaman, baik secara swadaya masyarakat maupun dukungan anggaran dari pemerintah (APBD/APBN)

(3) Kurangnya jumlah tenaga teknis dokter hewan, paramedis dan sarjana peternakan dalam upaya mempertahankan Kepri bebas penyakit zoonosis dan penyakit hewan menular strategis serta optimalisasi produksi ternak lokal untuk memenuhi kebutuhan ternak dan produk pangan asal hewan.

(4) Rendahnya kuantitas dan kualitas infrastruktur pendukung transportasi produk-produk pertanian

(5) Tidak tercapainya target produksi tanaman pangan, terutama padi dan kedelai disebabkan :

a. Ketersediaan lahan pertanian yang semakin menurun akibat alih fungsi lahan

b. Keterbatasan dalam pencetakan lahan baru

c. Penurunan kualitas lahan

d. Rata-rata kepemilikan lahan yang sempit

e. Ketidakpastian status kepemilikan lahan.

f. Kurangnya pembangunan bendungan dan jaringan irigasi baru serta rusaknya jaringan irigasi yang ada mengakibatkan daya dukung irigasi bagi pertanian sangat menurun.

g. Belum cukup tersedianya pupuk, pestisida/obat-obatan, alat dan mesin pertanian.

h. kurangnya modal usaha pertanian.

i. Kelembagaan petani yang belum mempunyai posisi tawar yang kuat

j. Rumah tangga petani semakin berkurang.

k. Keterbatasan Petani dalam Pemanfaatan Teknologi.

l. Perubahan iklim dan cuaca di Provinsi Kepulauan Riau belum bisa diprediksi.



Solusi :

- (1) Pengadaan dan penyediaan alat pengolah lahan bagi petani, agar dapat digunakan secara maksimal didalam pengolahan lahan pertanian.
- (2) Pemberian insentif dan pelatihan-pelatihan untuk menambah kemampuan petani dibidang budidaya pertanian.
- (3) Menambah nilai anggaran kegiatan-kegiatan yang bersentuhan langsung kepada petani/kelompok tani, peternak.
- (4) Penyediaan transportasi yang murah dan terjangkau.
- (5) Perhatian pusat dalam pengalokasian anggaran berdasarkan situasi dan kondisi di daerah kepulauan.

(8) Hal Lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan

Kondisi geografis Provinsi Kepulauan Riau yang terdiri dari pulau-pulau merupakan tantangan tersendiri bagi pembangunan, diantara permasalahan tersebut antara lain :

- (1) Permasalahan koordinasi antar kabupaten/kota Se-Provinsi Kepulauan Riau dengan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau belum maksimal dilakukan.
- (2) Meningkatkan alokasi dan memprioritaskan dana APBN, DAU, DBH untuk daerah-daerah perbatasan, karena daerah perbatasan merupakan pintu terdepan pertahanan bangsa dan negara Republik Indonesia.
- (3) Kurangnya jumlah armada transportasi udara dan transportasi laut serta jadwal keberangkatan yang tidak setiap hari menyebabkan kurangnya koordinasi tersebut.

2. Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kepulauan Riau

Tugas pembantuan dibidang PU yang diterima Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran Tahun 2017 dengan 1 (satu) program dan 3 (tiga) kegiatan dengan alokasi anggaran 7.961.684.000,- (Tujuh Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Juta Enam Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah) sedangkan realisasi keuangan Rp 7.955.678.000,- (99,92%) dan realisasi fisik 100% dengan rincian program kegiatan sebagai berikut :



1)Dasar Hukum

Adapun yang menjadi Dasar Hukum Tugas Pembantuan adalah sebagai berikut :

- DIPA Nomor: DIPA-033.04.4.329039/2017 tanggal 07 Desember 2016.

2)Instansi Pemberi Tugas Pembantuan (TP)

Instansi Pemberi Tugas Pembantuan Tahun 2017 bidang Pekerjaan Umum adalah Kementerian Pekerjaan Umum RI

3)Program dan Kegiatan

1.Program Penyelenggaraan Jalan

a)Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Meliputi :

- 1.Preservasi Rehabilitasi Jalan KM 16 (Sp. Gesek) Kijang CS Pulau Bintan Target Kuantitas 59.6 (58.41) Km, pagu anggaran Rp 2.164.716.000,- sampai dengan Desember 2017 realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan Rp 2.164.716.000,- (100%).
- 2.Preservasi Rehabilitasi Jalan Km 16 (Sp. Gesek) Kijang CS Pulau Bintan Target Kuantitas 59,6 (58,41) Km pagu anggaran Rp 2.164.716.000,- sampai dengan Desember 2017 realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan Rp 2.164.716.000,- (100%)
- 3.Preservasi Rehabilitasi Jalan KM 16 (Sp Gesek) Kijang CS Pulau Bintan Taret Kuantitas 1,19 (1,19) Km pagu anggaran Rp 39.000.000,- sampai dengan Desember 2017 realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan Rp 39.000.000,- (100%)
- 4.Preservasi Rehabilitasi Jalan KM 16 (Sp Gesek) Kijang CS Pulau Bintan Target Kuantitas 1,19 Km pagu anggaran RP 39.000.000,- sampai dengan Desember 2017 realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan Rp 39.000.000,- (100%)

b)Kegiatan Pemeliharaan Jalan Meliputi :

- 1.Preservasi Rehabilitasi Jalan KM 16 (Sp. Gesek) Kijang CS Pulau Bintan Target Kuantitas 0,77 (0,77) Km pagu anggaran Rp 5.113.884.000,- sampai dengan Desember 2017 realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan Rp 5.111.939,- (99,96%).
- 2.Preservasi Rehabilitasi Jalan KM 16 (Sp Gesek) Kijang CS Pulau Bintan Target Kuantitas 0,77 Km pagu anggaran Rp 5.113.884.000,- sampai dengan Desember 2017 realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan Rp 5.111.939.000,- (99,96%)



c) Kegiatan Layanan Internal Meliputi :

1. Layanan Internal (Overhead) Target Kuantitas 12 Layanan pagu anggaran Rp 683.084.000,- sampai dengan Desember 2017 realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan Rp 679.023.000,- (99,41%)

d) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan Tugas Pembantuan bidang Pemeliharaan jalan dan Jembatan adalah Dinas Pekerjaan Umum.

4) Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan

Sarana dan prasarana pendukung yang dimiliki Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kepulauan Riau yang digunakan cukup memadai.

3. Dinas Kelautan dan Perikanan

Tugas Pembantuan (TP) yang diterima Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau pada Tahun Anggaran 2017 yaitu :

1) Dasar Hukum

DIPA Nomor 032-04.04.329088/2017 tanggal 07 Desember 2016

2) Instansi Pemberi Tugas Pembantuan (TP)

Instansi Pemberi Tugas Pembantuan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya

3) Program Kegiatan

1. Program Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Budidaya Meliputi Kegiatan :

- a) Pengelolaan Sistem Perbenihan Ikan
- b) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lain nya Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya

Pengelolaan Sistem Perbenihan Ikan dengan Anggaran Sebesar Rp.550.000.000.-. Dengan Realisasi sebesar Rp.544.835.750.; (99.06%) dan realisasi fisik sebesar 100 %.

4) Satuan Kerja Perangkat Daerah Tugas Pembantuan (TP)

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Melaksanakan Tugas Pembantuan Bidang Kelautan dan Perikanan adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau.

a.n. SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA
u.b
KEPALA BUKU PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH SETDA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
Drs. EULHENDRI, M.Si
Pembina Utama Madya/ (IV/d)
NIP. 19660611 198602 1 004



